

BUPATI SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH NOMOR.1.5 .. TAHUN 2025 TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu mengatur Analisis Standar Belanja dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa agar penggunaan anggaran belanja dapat lebih efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam belanja daerah oleh setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk membentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Ata.s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subah Tengah 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
- Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
- Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
- Deskripsi kegiatan yaitu penjelasan detail operasional penentuan dari ASB dengan maksud untuk memudahkan pengelompokan kegiatan – kegiatan dan mempermudah penyusunan anggatan.
- 10. Pengendalian belanja (cost driver) merupakan factor factor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan dimana pengendalian belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB yang lain tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- 11. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan/atau target kinerja suatu kegiatan.
- 12.Satuan pengendali belanja variable (variabel cost) adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan/atau target kinerja suatu kegiatan.
- 13. Batasan Alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja suatu kegiatan yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu batas bawah, rata – rata dan batas atas.
- 14. Rumus perhitungan belanja total merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja tetap dan belanja variable dan menggunakan metode least square (analisis regresi linier) menggunakan program Statistical Product and Service Solution dan distribusi baik dengan membagi dalam kategori kelas maupun tidak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- Maksud ditetapkannya Analisis Standar Belanja sebagai acuan untuk mengukur belanja penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk setiap SKPD.
- (2) Adanya Analisis Standar Belanja yang komprehensif dapat membantu SKPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam menyusun perencanaan kebutuhan barang dan jasa, sehingga diformulasikannya suatu Standar Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- Tujuan Penetapan Analisis Standar Belanja adalah untuk memformulasikan standar anggaran belanja daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengendalian anggaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan setiap SKPD.
- (2) Standar yang digunakan untuk mengukur kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupayen Sumba Tengah dalam satu tahun anggaran.

(3) Untuk mendapatkan Standar Harga yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Keseragaman dalam penyusunan rencana kerja anggaran.

(5) Dapat dipergunakan oleh TAPD dalam proses asistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III PENERAPAN

Pasal 4

 Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja

(2) SKPD/Unit Kerja dapat menggunkan lebih dari 1 (satu) standar belanja apabila kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terdiri dari beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, setelah dilakukan pencermatan oleh TAPD.

(3) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD/ Unit Kerja belum diatur dalam Standar Belanja Umum, SKPD/Unit Kerja mengusulkan besaran belanja wajar serta kesesuaian rincian belanja dengan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.

(4) Rincian tahapan penerapan ASB tercantum dalm lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Rincian jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENERAPAN DAN PERUBAHAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 6

 ASB dipergunakan untuk menentukan standar belanja pada setiap kegiatan/ aktifitas dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.

(2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan/ aktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan/penambahan harga atau standar satuan harga dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah maka dapat dilakukan penyesuaian analisis standar belanja yang formula dan besarannya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGGUNAAN

Pasal 8

(1) Setiap Pimpinan SKPD wajib menggunakan ASB untuk mengendalikan pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah pada SKPD masing - masing

(2) Penggunaan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pengganggaranpada saat proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran pada setiap tahun anggaran berkenaan.

(3) Rencana Kegiatan Anggaran SKPD yang belum ada/belum diatur dalam ASB ini, sebaran objek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan oleh TAPD.

(4) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka penyesuaian standar belanja akan diatur dalam Peraturan Bupati.

(5) ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada penyusunan anggaran tahun 2026.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Sumba Tengah.

> Ditetapkan di Waibakul Pada tanggal 12 Februari 2025

Diundangkan di Waibakul Pada tanggal 13 Februari 2025

SEKERATARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH NOMOR..16.TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Analisis Standar Belanja (ASB) telah diperkenalkan kepada pemerintah daerah dalam peraturan pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikenal dengan istilah Standar Analisa Belanja (SAB) yang mempunyai makna sebagai suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Dari peraturan pemerintah tersebut, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan pedoman operasional berupa Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang pedoman, pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun Kepmendagri tersebut belum menunjukkan wujud atau bentuk dari standar analisa belanja (Rokhimakhumullah, 2016).

Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tersebut diperkenalkan istilah baru, yaitu istilah Analisis Standar Belanja (ASB) yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan Standar Analisa Belanja (SAB), yaitu suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penjabaran UU No. 32 Tahun 2004 terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian terbitlah Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi yang telah ditetapkan tersebut, ASB merupakan satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.

Regulasi yang mengamanatkan ASB, secara operasional belum mengatur pelaksanaan ASB, sehingga ASB menjadi sesuatu *utopia* bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Namun tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, terutama atas tuntutan akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Salah satu cara yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif adalah dengan menyusun standar biaya yaitu Analisis Standar Belanja (ASB). Pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program, dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Mahmudi, 2011). Selain itu, beberapa masalah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan timbul apabila tidak ada ASB adalah penentuan anggaran secara *incremental*, penentuan anggaran dipengaruhi oleh nama kegiatan, dan siapa yang mengajukan anggaran.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) harus menyerahkan beberapa dokumen sebagai lampiran. Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Analisis Standar Belanja (ASB), dan Standar Satuan Harga (SSH). Keterdesakan Pemerintah Daerah untuk menerapkan ASB semakin menjadi-jadi ketika Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat tertanggal 10 Oktober 2016 yang isinya mendorong seluruh pemda menerapkan E-Planning dalam perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten kota. Dalam penerapan e-planning tersebut, salah satu komponen yang diperlukan adalah Analisis Standar Belanja.

Penekanan efisiensi dan efektifitas anggaran terus dilakukan oleh pemerintah, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan pada transparansi dan akuntabitas dalam pelaporan, dan menerapkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran. Tuntutan dalam peraturan tersebut adalah bahwa belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuang peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mendorong Kabupaten Sumba Tengah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) berupaya untuk mewujudkan amanat dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Sistem informasi pemerintah daerah terdiri dari dua bagian alur yakni sistem informasi pembangunan daerah (E-Planning) dan sistem informasi keuangan daerah (E-budgeting) (UU No 23 tahun 2014). Untuk mengoptimalkan fungsi dari E-Planning, salah satu komponen yang harus dipenuhi dan dikerjakan adalah Analisis Standar Belanja (ASB). Peranan ASB dalam E-Planning adalah membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun anggaran program kerja/kegiatan masingmasing OPD agar lebih ekonomis, efisien dan efektif. Perencanaan pembangunan berbasis E-Planning memiliki dasar hukum yang antara lain:

- 1. UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - Pasal 262 ayat (1) rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Ayat (2) rencana pembangunan daerah memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
 - Pasal (274) perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.
 - Pasal 391 Ayat (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yang terdiri atas a) informasi pembangunan dan b) keuangan derah. Ayat (2) Informasi Pemerintah daerah dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 Ayat (1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. Ayat (2) dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Ayat (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis E-Planning. Ayat (4) Penerapan E-Planning diatur dalam peraturan Menteri.
- PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat (2) "Penyusunan anggaran prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal".

 Permendagri No. 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Bab III Pasal 2 "Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah menggunakan perencanaan berbasis elektronik/eplanning yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional".

1.2 Tujuan Penyusunan ASB

- Terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
- Terjadinya kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar OPD.
- 3. Terjadinya penghematan anggaran.
- Memberikan Pedoman dalam perhitungan besaran belanja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Kabupaten Sumba Tengah.

1.3 Manfaat Penyusunan ASB

- Meminimalisir pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
- Penentuan anggaran berdasarkan tolok ukur kinerja yang jelas.
- 3. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif.
- 4. Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- 5. Memudahkan penentuan plafon anggaran pada saat penyusunan PPAS. Y

LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum Analisis Standar Belanja

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun Analisis Standar Belanja, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2 "Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya.
- Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 20 ayat 2 : -Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
- 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal167 ayat 3 "Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja; dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
- Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 ayat 3:- Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 2, "Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal".
- 7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 ayat 3, "Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal".
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2: "Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD,format RKA-SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga".
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93:(1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, (2) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 "Pembahasan oleh TAPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaianantara RKA-SKPD dengan KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD".
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2: "Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 : "Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah: kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2 Anggaran Berbasis Kinerja

Sebagai suatu sistem, perencanaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di masyarakat, sehingga saat ini berkembang sistem anggaran berbasis kinerja. Menurut Bastian (2006), kinerja adalah gambaran suatu kegiatan/program/kebijaksanaan pelaksanaan mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Setiap kegiatan organisasi harus diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan visi dan misi organisasi. Produk akan kehilangan nilai apabila kontribusi produk tersebut tidak dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam konteks daerah, konsep kinerja harus dianggap sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu maupun terhadap daerah atau OPD lain. Selain itu, kinerja mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimumkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi publik. Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang telah ditetapkan (PP No. 105 Tahun 2000, pasal 8). Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja (Pohan dalam Halim dan Damayanti, 2007).

Penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikannya prinsipprinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Halim (2007) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja, yaitu:

- Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran. Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan- kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
- Disiplin Anggaran. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya.
- Keadilan Anggaran. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.
- 4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders.
- 5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan, selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

Mengacu pada definisi Anggaran Berbasis Kinerja, maka penyusunan Anggaran Berdasarkan Kinerja pada dasarnya sudah dilakukan sejak Pemerintah Daerah mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas berdasarkan hasil dan output-nya. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan kinerja akan terlihat secara operasional pada setiap OPD yang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) (Elmi, 2002).

Mengingat kinerja bersifat relatif, maka harus ada data pembanding (benchmark). Dengan adanya data pembanding, memungkinkan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan data pembanding tersebut atau program dan kegiatan yang sama di tahun sebelumnya (Elmi, 2002). Suatu program atau kegiatan dikatakan semakin efisien untuk mencapai output tertentu diperlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan data dasar (benchmark) atau dengan biaya tertentu akan diperoleh output yang lebih besar dibandingkan data dasar dan sebaliknya. Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana output dengan terhadap rencana hasil. Jika dengan rencana output tertentu akan mampu dicapai hasil yang ψ

lebih besar atau dengan target hasil tertentu akan dicapai dengan *output* yang lebih kecil dibandingkan dengan data dasar, maka program dan kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif.

2.3 Activity Based Costing

Activity Based Costing (ABC) adalah sistem kalkulasi biaya yang menelusuri biaya ke aktivitas kemudian ke produk (Hansen dan Mowen, 2006). Pendekatan ABC adalah suatu tehnik yang digunakan untuk mengukur biaya dan kinerja dari suatu kegiatan secara kuantitatif. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing objek biaya dalam sebuah kegiatan.

Dalam pembuatan ASB, pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap dan biaya variabel. Disamping itu, proses evaluasi dan penilaian kewajaran biaya dengan pendekatan ABC berdasarkan biaya-biaya per kegiatan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan ASB dengan menggunakan pendekatan ABC adalah sebagai berikut:

- Mengelompokkan kegiatan-kegiatan dengan output yang sama dalam satu kelompok.
- Menentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan menyebabkan timbulnya biaya dalam suatu kegiatan.
- Menentukan cost driver yang merupakan faktor-faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total dalam suatu kegiatan atau variabelvariabel yang menjadi penyebab munculnya perbedaan biaya dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu.

2.4 Analisis Standar Belanja

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran (Mahmudi, 2010). Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain:

- Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya.
- Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang mengakibatkan inefisiensi anggaran.
- 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 4. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.
- Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.
- Penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi objektif tidak lagi berdasarkan "intuisi".
- 7. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif.
- 8. Memiliki argumen yang kuat jika "dituduh" melakukan pemborosan.
- Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.

Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki kedudukan yang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan Anggaran Daerah yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan Anggaran Daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala

prioritas dan besarnya plafon anggaran (Tanjung,2010). Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah.

Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah Analisis Standar Belanja (ASB).

2.5 Posisi ASB dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

ASB memiliki peran yang penting dalam berbagai tahap pengelolaan keuangan daerah (Tanjung, 2010), yakni:

- Tahap Perencanaan Keuangan Daerah
 ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB dapat
 digunakan pada saat Musrenbang, penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja
 OPD), dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahap
 tersebut ASB digunakan oleh para perencana untuk mengarahkan para
 pengusul kegiatan, baik masyarakat ataupun aparatur Pemerintah Daerah
 (Pemda) untuk fokus pada kinerja (Tanjung, 2010).
- 2. Tahap Penganggaran Keuangan Daerah ASB digunakan pada saat proses penganggaran keuangan daerah, yaitu pada saat penentuan plafon anggaran sementara dan penyusunan rencana kerja anggaran. ASB digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis antara kewajaran beban kerja dan biaya usulan program atau kegiatan bersangkutan (Tanjung, 2010).
- Tahap Pengawasan/Pemeriksaan
 Pada tahap pengawasan/pemeriksaan, pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan dari suatu kegiatan (Tanjung, 2010).

2.6 Perilaku dan Metode Penentuan Pola Perilaku Belanja

Sebagian besar keputusan yang diambil pemerintah daerah memerlukan informasi belanja yang didasarkan pada perilakunya. Oleh sebab itu, perlu diketahui penggolongan belanja atas dasar perilakunya. Perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas Pemerintah Daerah. Belanja dapat digolongkan menjadi tiga jenis sebagai berikut: belanja variabel, belanja tetap, dan belanja semi variabel (Utami dan Damayanti, 2004).

- Belanja Variabel
 Belanja variabel adalah belanja yang totalnya selalu berubah secara
 proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah
 daerah. Besar kecilnya total belanja variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya
 target kinerja. Misalnya: belanja makan minum, belanja sewa gedung.
- Belanja Tetap
 Belanja tetap adalah belanja yang di dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah-ubah. Sejauh tidak

melampaui kapasitas, belanja tetap total tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya target kinerja pemerintah daerah. Misalnya: belanja gaji ASN.

3. Belanja Semi Variabel

Belanja semi variabel adalah belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Belanja ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam belanja semi variabel terkandung unsur belanja tetap dan belanja variabel.

Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerja kegiatan, dinyatakan dengan fungsi belanja sebagai berikut:

Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel Total

Atau

Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel Per Unit x Target Kinerja Kegiatan.

Ada beberapa metode untuk menentukan pola perilaku belanja, yaitu (Utami dan Damayanti, 2004):

- a) Metode titik tertinggi dan titik terendah Cara menentukan pola perilaku belanja dengan menganalisis belanja masa lalu pada target kinerja kegiatan yang tertinggi dan target kinerja kegiatan yang terendah. Keunggulan: obyektivitas Kelemahan: 1) titik tinggi & rendah mungkin merupakan outliers, 2) pasangan titik lain mungkin lebih mewakili.
- b) Metode scatterplot Metode penentuan model belanja dengan memplot data dalam suatu grafik. Keunggulan: melihat data secara visual Kelemahan: tidak adanya kinerja objektif untuk memilih garis terbaik.
- Metode kuadrat terkecil

 Metode yang menentukan prediksi model belanja terbaik berdasarkan jarak/perbedaan terkecil antara belanja aktual dengan belanja yang diprediksi oleh model belanja. Menggunakan analisis regresi sederhana dan atau regresi berganda. Metode kuadrat terkecil merupakan metode yang paling akurat dibandingkan dua metode lainnya.

METODE PENELITIAN

Pada penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Sumba Tengah terdiri analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Langkah-langkah metode penelitian ASB adalah terdiri dari 5 langkah yaitu:

1. Inventaris

Tim melakukan pengumpulan data kegiatan setiap OPD selama kurun waktu 2019 sampai 2023 dari DPA/Realisasi dan menghasilkan data berupa kegiatan dan output setiap kegiatan tersebut.

Identifikasi

Pemisahan obyek belanja dan identifkasi jenis kegiatan sebagai bahan penentu cost-driver. Tim menemukan sejumlah kendala berupa ketidaksamaan output dari setiap kegiatan.

Klarifikasi

Setelah pengelompokan kegiatan yang sama, kemudian tim melakukan telaah terhadap variabel yang mempengaruhi setiap kegiatan, namun terdapat juga kegiatan yang tidak memiliki variabel pemicu disebabkan keberagaman terhadap outputnya.

Pada tahap ini, tim melakukan klarifikasi terhadap setiap OPD terkait kegiatan yang telah mereka lakukan.

4. Formulasi

Menggunakan regresi untuk setiap variabel yang memiliki pengaruh terhadap anggaran dan atau distribusi t bagi kegiatan yang tidak memiliki variabel pemicu.

Due Deligent

Simulasi formula terhadap sebuah kegiatan dan evaluasi kewajaran biaya yang dihasilkan.

3.1 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi yang dikumpulkan adalah seluruh OPD ataupun unit di Kabupaten Sumba Tengah. Kemudian, dipilih sampel dengan catatan yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sampel atau disebut dengan sampel jenuh (saturation sampling). Sehingga terpilih 54 OPD dan atau unit yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1. OPD dan atau Unit di Kabupaten Sumba Tengah

Sekretariat DPRD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Dinas Peternakan
Bagian Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak
Bagian Hukum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Bagian Pemerintahan	UPTD Pengelolaan Air Minum	Dinas Lingkungan Hidup
Bagian Organisasi	Dinas Perikanan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan	Dinas Komunikasi dan Informatika

	Perijinan Terpadu Satu Pintu		
Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perhubungan	
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan	
Inspektorat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RSUD Waibakul	
Badan Keuangan Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Puskesmas Weeluri	
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Puskesmas Wairasa	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	UPTD Mekanisasi, Perbenihan, dan POPT	Puskesmas Malinjak	
Puskesmas Lawonda	Puskesmas Umbu Riri	Kecamatan Mamboro	
Puskesmas Mananga	Puskesmas Tanambanas	Kecamatan Katikutana	
Puskesmas Maradesa	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kecamatan Katikutan Selatan	
Puskesmas Lendiwacu	Sanggar Kegiatan Belajar	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	
Puskesmas Pahar	Kecamatan Umbu Ratu Kecamatan Um Nggay Tengah Nggay Barat		

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekunder berupa DPA/Realisasi dari setiap OPD, sehingga terkumpul total terdapat 54 OPD yang dianalisis. Sedangkan wawancara dengan teknik "Focus Group Discussion" (FGD) terhadap pihak-pihak yang berkentingan terhadap anggaran pada setiap OPD. Pada tahap ini, dilakukan untuk mengklarifikasi kegiatan yang memiliki output yang berbeda serta mendapatkan masukan berupa cost driver.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Sumba Tengah terdapat dua teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi dan distribusi-t. Tujuan utama dari analisis regresi linier bertujuan untuk mencari hubungan linier antar variabel-variabel, dalam hal ini. ASB akan ditentukan melalui persamaan berikut:

Y = a + bXDimana, \checkmark Y merupakan variabel terikat yaitu anggaran

a merupakan biaya tetap dari anggaran

b merupakan biaya variabel dari anggaran

X merupakan variabel bebas yang merupakan cost driver dari anggaran.

Distribusi-t merupakan metode yang digunakan jika teknik regresi tidak dapat dipakai untuk suatu kegiatan ASB. Teknik ini adalah mencari titik tertinggi dan terendah suatu anggaran berdasarkan pola data masa lampau.

4.1.1 ASB 01: Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Deskripsi:

Kegiatan pendukung operasional perkantoran rutin dimana kegiatan ini terdiri dari pengiriman surat dan atau barang serta benda pos lainnya.

Tabel 4.1. Hasil Uji Distribusi t ASB 01

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata- rata
Total Anggaran:			
Kelas 1	10.673.833	540.000	
Kelas 2	20.807.667	10.673.833	
Kelas 3	30.941.500	20.807.667	
Bahan Bahan Habis Pakai	99,57%	1,68%	98%
Belanja Perjalanan Dinas	90%	0 %	2%
Jumlah			100%

Tabel 4.2. Daftar Kelas OPD ASB 01

Kelas	Daftar OPD
1	Sekretariat Korpri, Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Badan Keuangan Daerah
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ASB kegiatan penyediaan jasa surat menyurat menggunakan distribusi t dengan kategori. Berdasarkan perhitungan dari rumus pembentukan kategori ditemukan 3 kelas atau kategori yang mana tiap kategori memuat OPD. Pengelompokan ini berdasarkan pola belanja tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Namun metode ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD, meskipun ASB ini jenis kegiatannya sama. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihakpihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.2 ASB 02: Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Deskripsi:

Kegiatan pendukung operasional perkantoran rutin dimana kegiatan ini terdiri dari pembayaran air, listrik, telepon, dan internet.

Cost Driver: Jumlah Mbps, Jumlah Liter, Jumlah Kwh 🤟

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas ASB 02

						Unstandardize d Residual
N						70
Normal Param	eters".b		Mean			.0000000
			Std. Devia	ation		10209744.389
						11415
Most	Extr	eme	Absolute			.223
Differences			Positive			.203
			Negative			223
Test Statistic						.223
Asymp. Sig. (2	2-tailed)	е				<.001
Monte Carlo			Sig.			<.001
tailed)d			99%	Confidence	Lower	.000
			Interval		Bound	
					Upper	.000
					Bound	

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas, karena nilai signifikannya (0,000) dibawah 0,05 (5%). Artinya adalah data menunjukkan ketidaknormalan data antara satu dengan yang lainnya. Penyebab ketidaknormalan data adalah nilai outliers. Outliers merupakan nilai ekstrim yang menyimpang dari pola distribusi data lainnya. Melanggar asumsi normalitas berarti ASB tidak dapat dipakai karena hasilnya tidak menjadi BLUE (Best Linier Unbias Estimator). Jika ASB dipakai, maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggaran.

Data outliers dapat diatasi dengan cara menghilangkan data yang menyimpang dari distribusi. Namun sulit untuk dilakukan karena jumlah data sangat minim serta penghilangan data outliers tidak dapat dilakukan karena berpengaruh pada anggaran dan merugikan OPD sebab menghapus data outliers dapat menyebabkan hilangnya informasi dan hasil yang bias. Berikutnya, jika dari total data yang diolah ada OPD yang tidak mengumpulkan data akan dirugikan karena harus mengikuti OPD lainnya.

Tabel 4.4. Hasil Uji F ASB 02

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30783079894	3	10261026631	941.577	<.001b
	- 2771-	7992580,000		5997520.000		
	Residual	71924827538	66	10897701142		
		82526.000		2462.520		
	Total	31502328170	69			
		1875070.000				

a. Dependent Variable: Total Anggaran

b. Predictors: (Constant), KWH, Liter, MBPS

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan layak, dikarena nilai signifikan 0,001 dibawah nilai 0,05 namun tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi asumsi normalitas. Implikasinya adalah ASB Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak dapat —

dilanjutkan. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya.

Penyebabnya adalah:

- a) Data yang digunakan mungkin tidak akurat, tidak lengkap.
- b) Ukuran sampel terlalu kecil.
- c) Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, hasil model bisa menjadi tidak layak.
- d) Keberadaan outlier dapat menyebabkan hasil model menjadi bias, sehingga uji F menunjukkan model tidak signifikan.

Tabel 4.5. Hasil Uji t ASB 02

		Unstandardi: Coefficients	zed	Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
	(Constant)	=	1799219.51		359	.721
		645826.998	3			
	Jumlah Mbps	9647.530	1907.530	.122	5.058	<.001
	Jumlah Liter	101.907	30.044	.064	3.392	.001
	Jumlah KWH	1686.210	44.915	.911	37.542	<.001

a. Dependent Variable: Total Anggaran

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa Jumlah Mbps, Jumlah Liter, dan Jumlah Kwh berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dikarenakan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05; 0,001<0,05; dan 0,001<0,05). Akan tetapi, ASB Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak dapat dianalis dengan model regresi linear berganda karena data tidak normal. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya.

Persamaan Y:

 $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$

a = -645.826,998

 $b_1 = 9.647,53$

 $b_2 = 101,907$

 $b_3 = 1.626,201$

Sehingga:

 $Y = -645.826,998 + 9.647,53X_1 + 101,907X_2 + 1.626,201X_3$

Keterangan:

Y = Total Anggaran

a = Biaya Tetap

b₁ = Biaya Variabel Jumlah Mbps

b2 = Biaya Variabel Jumlah Liter

b₃ = Biaya Variabel Jumlah Kwh

X₁ = Jumlah Mbps

X2 = Jumlah Liter

 $X_3 = Jumlah Kwh$

Simulasi:

Salah satu OPD menggunakan jasa komunikasi sebanyak 1.200 mbps, air sebanyak 48.000, dan jumlah Kwh sebanyak 11.430, maka total anggaran adalah sebagai berikut:

```
Y = -645.826,998 + 9.647,53X_1 + 101,907X_2 + 1.626,201X_3

Y = -645.826,998 + 9.647,53(1200) + 101,907(48.000) + 1.626,201(11.430)

Y = -645.826,998 + 11.577.036 + 4.891.536 + 18.587.477,43

Y = 34.410.222,432
```

Jadi, total anggaran untuk ASB Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air adalah sebesar Rp. 34.410.222,432.

Dari kondisi di atas maka metode titik tertinggi dan titik terendah digunakan dalam menghasilkan ASB Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik:

Tabel 4.6. Hasil Uji Distribusi t ASB 02

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata-rata
Total Anggaran			
Kelas 1	54.199.564	406.000	
Kelas 2	107.993.128	54.199.564	
Kelas 3	161.786.692	107.993.128	
Kelas 4	215.580.256	161.786.692	
Kelas 5	269.373.820	215.580.256	
Kelas 6	323.167.384	269.373.820	
Kelas 7	376.960.949	323.167.384	
Bahan Bahan Habis Pakai	5.27%	2%	4,28%
Belanja Jasa Kantor	90,39%	92%	91,11%
Jumlah			95,39%

Tabel 4.7. Daftar Kelas OPD ASB 02

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas PRKPP, Kec. Mamboro, Dinas Perhubungan, Dinas P2KB, SMPN 2 Umbu Ratu Nggay, POLPP, Dinas Perpustakaan, SMPN 3 Umbu Ratu Nggay, SD-SMP Satap Alanga, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PUPR, SMPN 5 Umbu Ratu Nggay, Dinas Pertanian, DPMD, SD-SMP Satap Karoggi Rowa, SMPN 3 Waibakul, SD-SMP Satap Uma Paohi, SMPN 4 Waibakul, SMPN Satap Watu Lade, SMPN 4 Umbu Ratu Nggay, Dinas Pariwisata, DINSOS, SD-SMP Satap Waikajanga, SD-SMP Satap Taman Mas, SMPN 5 Waibakul, SMPN 2 Waibakul, SMPN 1 Umbu Ratu Nggay Barat, SD-SMP Satap Lailori, SMPN 6 Umbu Ratu Nggay, SMPN 1 Mamboro, SMPN 2 Mamboro, Dinas Transmigrasi, SMPN 3 Mamboro, SMPN 2 Umbu Ratu Nggay Barat, SD-SMP Satap Sawirara, Dinas Perikanan, Bagian Organisasi, SMPN 1 Waibakul, Dinas P2KB, SD-SMP Satap Ngadu Bolu, Puskesmas Mananga, Puskesmas Maradesa, SD-SMP Satap Kambera Laja, Badan Kesbangpol, Dinas PPO, Puskesmas Wairasa, Bagian Protokoler, Dinas Kominfo, Kec. Katikutana Selatan, Puskesmas Malinjak, Puskesmas Weeluri, Dinas KUKM, Puskesmas Lendiwacu, Sanggar Kegiatan Belajar, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat, Dinas

	Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kec. Katikutana, Puskesmas Lawonda, Bappelitbangda, DLH, Dinas Peternakan, BKD, Puskesmas Umbu Riri, UPTD Pengelola Air Minum, Puskesmas Tanambanas.
2	Sekretariat DPRD, BKPSDMD,
3	RSUD
4	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
5	
6	
7	Sekretariat Daerah, Bagian Umum

ASB kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik menggunakan distribusi t dengan kategori. Berdasarkan perhitungan dari rumus pembentukan kategori ditemukan 7 kelas atau kategori yang mana setiap kategori memuat OPD di dalamnya. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.3 ASB 03: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Deskripsi:

Kegiatan pendukung operasional perkantoran rutin dimana kegiatan ini terdiri dari pembayaran honor PNS dan honor non PNS untuk berbagai kegiatan di luar program kerja OPD.

Tabel 4.8. Hasil Uji Distribusi t ASB 03

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata-rata
Total Anggaran			
Kelas 1	27,891,429	390,000	
Kelas 2	55,392,857	27,891,429	
Kelas 3	82,894,286	55,392,857	
Kelas 4		82,894,286	
Kelas 5	110,395,714	110,395,714	
Kelas 6		137,897,143	
Kelas 7	137,897,143	165,398,571	
	165,398,571		
	192,900,000		
Honorarium PNS	77%	84%	79%
Belanja Bahan Habis Pakai	17%	8%	15%
Belanja Honorarium Non PNS	12%	0%	6%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1%	0%	0%
Jumlah			95,39%

Dua rincian belanja, yaitu honorarium PNS dan uang lembur memiliki nilai batas atas dan batas bawah tidak sesuai karena ketimpangan atau deviasi standar yang sangat tinggi antara data yang nilainya paling tinggi dan paling rendah.

Tabel 4.9. Daftar Kelas OPD ASB 03

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas Wairasa, Puskesmas Lindiwacu, Puskesmas Malinjak, Puskesmas Lawonda, Puskesmas Maradesa, Puskesmas Mananga, Puskesmas Weeluri, Puskesmas Pahar, Dinas PPO, Dinas PUPR, Dinas PRKPP, KESBANGPOL, POLPP, DINSOS, Dinas Perikanan, SMPN 1 Waibakul, SMPN 2 Waibakul, SMPN 3 Waibakul, SMPN 1 Mamboro, SMPN 1 Umbu Ratu Nggay, SMPN 2 Umbu Ratu Nggay, SMPN 1 Umbu Ratu Nggay, SMPN 2 Umbu Ratu Nggay Barat, SD-SMP Satap Lailori, SMPN 5 Umbu Ratu Nggay, SD-SMP Satap Sawirara, SD SMP Satap Karoggi Rowa, SD SMP Satap Waikajanga, SD SMP Satap Ngadu Bolu, Sanggar Kegiatan Belajar, SMP Negeri 2 Mamboro, SMP Negeri 4 Waibakul, SMPN 3 Umbu Ratu Nggay Barat, SMP Negeri 3 Umbu Ratu Nggay, SMP Negeri 3 Mamboro, SMPN Satap Watu Lade, SD SMP Satap Uma Paohi, SD SMP Satap Taman Mas, SD SMP Satap Kambera Laja, SMPN 5 Waibakul, SD SMP Satap Pantai Maloba, SD SMP Satap Paraimahala, SD SMP Satap Alanga, SMPN 4 Umbu Ratu Nggay, SMPN 6 Umbu Ratu Nggay, Badan Kepegawaian, Protokol & Humas, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Perencanaan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kecamatan Mamboro, Kecamatan Katikutana Selatan, Kecamatan katikutana, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Bagian Perekonomian & SDA, Bagian Kesejahtaraan Sosial, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang & Jasa Sekretariat Korpri
2	Bagian Administrasi Pembangunan
3	(a)
4	-
5	
6	-
7	Bagian Umum

4.1.4 ASB 04: Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Deskripsi:

Kegiatan pendukung operasional perkantoran rutin dimana kegiatan ini terdiri dari pembersihan ruangan dan halaman kantor.

Tabel 4.10. Hasil Uji Distribusi t ASB 04

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata-rata	
Total Anggaran:				
Kelas 1	24,480,500	885,000		
Kelas 2	48,076,000	24,480,500		
Belanja Bahan Habis Pakai	100%	100%	100%	
Jumlah			100%	

Keterangan:

 ASB kegiatan ini tidak termasuk belanja honorarium PNS/Non PNS, belanja modal, dan belanja pakaian kerja.

Tabel 4.11. Daftar Kelas OPD ASB 04

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas Wairasa, Dinas PPO, Dinas PUPR, Dinas PRKPP, Kesbangpol, POLPP, Dinsos, Dinas Pertanian Dinas Transmigrasi, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, SMPN 1 Waibaku; SMPN 2 Waibakul, SMPN 3 Waibakul, SMPN 1 Mamboro SMPN 1 Umbu Ratu Nggay, SMPN2 Umbu Ratu Nggay, SMPN 1 Umbu Ratu Nggay Barat, SMPN 2 Umbu Ratu Nggay Barat, SD-SMP Satap Lailori, SMPN 5 Umbu Ratu Nggay, SD-SMP Satap Sawirara, SD-SMP Satap Karoggi Rowa, SD-SMP Satap Waikajanga SD-SMP Satap Ngadu Bolu, Sanggar Kegiatan Belajar, SMPN 2 Mamboro, SMPN 4 Waibakul, SMPN3 Umbu Ratu Nggay, SMPN3 Umbu Ratu Nggay Barat, SMPN 3 Mamboro, SMPN Satap Watu Lade, SD-SMP Satap Uma Paohi, SD-SMP Satap Taman Mas, SD-SMP Satap Kambera Laja, SMPN 5 Waibakul, SD-SMP Satap Pantai Maloba, SD-SMP Satap Paraimahala, SD-SMP Satap Alanga SMPN 4 Umbu Ratu Nggay, SMPN 6 Umbu Ratu Nggay, Bagiar Kepegawaian, Inspektorat, Protokol dan Humas, BKD Bappelitbangda, SEKWAN, Bagian Adm. Pembangunan, Bagiar Organisasi, Kec. Umbu Ratu Nggay, Kec. Mamboro, Kec Katikutana, Kec. Katikutana Selatan, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretaria Korpri.
2	Bagian Umum

4.1.5 ASB 05: Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Deskripsi:

Kegiatan pendukung operasional perkantoran rutin dimana kegiatan ini terdiri dari pembelian ATK dan barang-barang lain yang juga mendukung operasional rutin. —

Tabel 4.12. Hasil Uji Distribusi t ASB 05

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata-rata	
Total Anggaran:				
Kelas 1	18,560,000	2,500,000		
Kelas 2	34,620,000	18,560,000		
Kelas 3	50,680,000	34,620,000		
Belanja Bahan Habis Pakai	100%	100%	100%	
Jumlah	100%			

Tabel 4.13. Daftar Kelas OPD ASB 05

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian, Badan Penanggulangan Bencana, Bapelitbangda, Bagian Adm. Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahtaraan Sosial, Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan Bagian Pengadaan Barang & Bagian Perekonomian & SDA, Dinas Perikanan, Dinas pertanian, Dinas Peternakan, Dinas PRKPP, Dinas PUPR, Dinas Transmigrasi, DINSOS, INSPEKTORAT, Kecamatan katikutana, Kecamatan Katikutana Selatan, Kecamatan Mamboro, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Barat, KESBANGPOL, POLPP, Protokol & Humas, Puskesmas Lawonda, Puskesmas Lindiwacu, Puskesmas Malinjak, Puskesmas Mananga, Puskesmas Maradesa, Puskesmas Pahar, Puskesmas Wairasa, Puskesmas Weeluri, Sanggar Kegiatan Belajar, SD-SMP Satap Lailori, SD-SMP Satap Sawirara, SD SMP Satap Waikajanga, SD SMP Satap Alanga, SD SMP Satap Ngadu Bolu, SD SMP Satap Fantai Maloba, SD SMP Satap Paraimahala, SD SMP Satap Taman Mas, SD SMP Satap Paraimahala, SD SMP Satap Taman Mas, SD SMP Satap Paohi, Sekretariat Korpri, SEKWAN, SMP Negeri 2 Mamboro, SMP Negeri 3 Mamboro, SMP Negeri 3 Umbu Ratu Nggay, SMP Negeri 4 Waibakul, SMPN 1 Mamboro, SMPN 1 Umbu Ratu Nggay, SMPN 2 Umbu Ratu Nggay Barat, SMPN 1 Waibakul, SMPN 2 Umbu Ratu Nggay Barat, SMPN 3 Waibakul, SMPN 4 Umbu Ratu Nggay, SMPN 5 Umbu Ratu Nggay,
2	RSUD

ASB kegiatan penyediaan alat tulis kantor menggunakan distribusi t dengan kategori. Berdasarkan perhitungan dari rumus pembentukan kategori ditemukan 3 kelas atau kategori yang mana setiap kategori memuat OPD di dalamnya. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD.

ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihakpihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama. ✓

4.1.6 ASB 06: Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Deskripsi:

Kegiatan pendukung operasional perkantoran rutin dimana kegiatan ini terdiri dari penjilidan, pencetakan dan fotokopi dokumen di luar dari program kerja OPD.

Cost Driver: Jumlah Jilidan, Jumlah Eksemplar

Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas ASB 06

N Normal Par	rameters ^{a,b}	Mean Std. Dev	iation		Unstandardized Residual 61 .0000000 4043485.742717
Most Differences		Absolute Positive Negative			.183 .183 171
	tic g. (2-tailed) ^c rlo Sig. (2-	Sig.			.183 <.001 <.001
tailed)d		99% Interval	Confidence	Lower Bound Upper Bound	.000

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas, karena nilai signifikannya (0,001) dibawah 0,05 (5%). Artinya adalah data menunjukkan ketidaknormalan data antara satu dengan yang lainnya. Penyebab ketidaknormalan data adalah nilai outliers. Outliers merupakan nilai ekstrim yang menyimpang dari pola distribusi data lainnya. Melanggar asumsi normalitas berarti ASB tidak dapat dipakai karena hasilnya tidak menjadi BLUE (Best Linier Unbias Estimator). Jika ASB dipakai, maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggaran.

Data outliers dapat diatasi dengan cara menghilangkan data yang menyimpang dari distribusi. Namun sulit untuk dilakukan karena jumlah data sangat minim serta penghilangan data outliers tidak dapat dilakukan karena berpengaruh pada anggaran dan merugikan OPD sebab menghapus data outliers dapat menyebabkan hilangnya informasi dan hasil yang bias. Berikutnya, jika dari total data yang diolah ada OPD yang tidak mengumpulkan data akan dirugikan karena harus mengikuti OPD lainnya.

Tabel 4.15. Hasil Uji F ASB 06

		Sum of				
Model		Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	48559770495	2	24279885247	14.355	<.001b
		5620.000		7810.000		
	Residual	98098661709	58	16913562363		
		3559.500		682.060		

Total	14665843220	60
	49179.500	

a. Dependent Variable: Total Anggaran

b. Predictors: (Constant), Jumlah Jilidan, Jumlah Eksemplar

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan layak, dikarena nilai signifikan 0,001 dibawah nilai 0,05 namun tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi asumsi normalitas. Implikasinya adalah ASB Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak dapat dilanjutkan. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya.

Penyebabnya adalah:

- a) Data yang digunakan mungkin tidak akurat, tidak lengkap.
- b) Ukuran sampel terlalu kecil.
- c) Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, hasil model bisa menjadi tidak layak.
- d) Keberadaan outlier dapat menyebabkan hasil model menjadi bias, sehingga uji F menunjukkan model tidak signifikan.

Tabel 4.16. Hasil Uji t ASB 06

Мо	del	Unstandardi Coefficients B	zed Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4121867.10 3	750593.78 7		5.491	<.001
	Jumlah Eksemplar	120.043	31.512	.424	3.809	<.001
	Jumlah Jilidan	17468.267	6611.618	.294	2.642	.011

a. Dependent Variable: Total Anggaran

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa Jumlah Eksemplar dan Jumlah Jilidan berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dikarenakan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05 dan 0,011<0,05). Akan tetapi, ASB Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak dapat dianalis dengan model regresi linear berganda karena data tidak normal. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya.

Persamaan Y:

 $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$ a = 4.121.867,103 $b_1 = 120,043$ $b_2 = 17.468,267$

Sehingga:

 $Y = 4.121.867,103 + 120,043X_1 + 17.468,267X_2$

Keterangan:

Y = Total Anggaran

a = Biaya Tetap

b₁ = Biaya Variabel Jumlah Eksemplar

b₂ = Biaya Variabel Jumlah Jilidan

X₁ = Jumlah Eksemplar \(\sigma\)

Simulasi:

Salah satu OPD menghasilkan dokumen sebanyak 10 jilidan, dan eksemplar sebanyak 1.000, maka total anggaran adalah sebagai berikut:

 $Y = 4.121.867,103 + 120,043X_1 + 17.468,267X_2$ Y = 4.121.867,103 + 120,043(10.000) + 17.468,267(10) Y = 4.121.867,103 + 1.200.430 + 174.682,67Y = 5.496.979,773

Jadi, total anggaran untuk ASB Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah sebesar Rp. 5.496.979,773

Dari kondisi di atas maka metode titik tertinggi dan titik terendah digunakan dalam menghasilkan ASB Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan:
Tabel 4.17. Hasil Uji Distribusi t ASB 06

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata-rata
Total Anggaran:	268,630,000	500,000	
Belanja Barang Pakai Habis	55%	48%	
Belanja Cetak dan Penggandaan	32%	44%	35%
Belanja Jasa Kantor	34%	0%	12%
Jumlah			100%

ASB kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun, hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD.

ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihakpihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.6 ASB 07: Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Deskripsi:

Kegiatan pendukung operasional perkantoran rutin dimana kegiatan ini terdiri dari berlangganan media cetak dan pembelian buku cetak.

Tabel 4.18. Hasil Uji Distribusi t ASB 07

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata-rata
Total Anggaran:			
Kelas 1	13.150.000	200.000	
Kelas 2	26.100.000	13.150.000	88%
Belanja Jasa Kantor	91%	79% 0,00 %	
Belanja Perjalanan Dinas	9%		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14%	0,00	7%
Jumlah			100%

Tabel 4.19. Daftar Kelas OPD ASB 07

Kelas
1
2

ASB kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan menggunakan distribusi t dengan kategori. Berdasarkan perhitungan dari rumus pembentukan kategori ditemukan 2 kelas atau kategori yang mana setiap kategori memuat OPD di dalamnya. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD.

ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihakpihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.7 ASB 08: Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Deskripsi:

Kegiatan pendukung operasional perkantoran rutin dimana kegiatan ini terdiri dari pemasangan instalasi listrik, perbaikan/penggantian komponen listrik (contoh: sakelar), dan penggantian bola lampu.

Cost Driver: Jumlah Lampu 4

Tabel 4.20. Hasil Uji Normalitas ASB 08

						Unstandardize d Residual
N						41
Normal Paramet	ersa,b		Mean			.0000000
			Std. Devia	ition		5980361.3815
						0109
Most Extreme		eme	Absolute			.284
Differences	Differences		Positive			.176
			Negative			284
Test Statistic						.284
Asymp. Sig. (2-ta	ailed)	0:				<.001
Monte Carlo	Sig.	(2-	Sig.			<.001
tailed)d			99%	Confidence	Lower	.000
			Interval		Bound	
					Upper	.000
					Bound	

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas, karena nilai signifikannya (0,001) dibawah 0,05 (5%). Artinya adalah data menunjukkan ketidaknormalan data antara satu dengan yang lainnya. Penyebab ketidaknormalan data adalah nilai outliers. Outliers merupakan nilai ekstrim yang menyimpang dari pola distribusi data lainnya. Melanggar asumsi normalitas berarti ASB tidak dapat dipakai karena hasilnya tidak menjadi BLUE (Best Linier Unbias Estimator). Jika ASB dipakai, maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggaran.

Data outliers dapat diatasi dengan cara menghilangkan data yang menyimpang dari distribusi. Namun sulit untuk dilakukan karena jumlah data sangat minim serta penghilangan data outliers tidak dapat dilakukan karena berpengaruh pada anggaran dan merugikan OPD sebab menghapus data outliers dapat menyebabkan hilangnya informasi dan hasil yang bias. Berikutnya, jika dari total data yang diolah ada OPD yang tidak mengumpulkan data akan dirugikan karena harus mengikuti OPD lainnya.

Tabel 4.21. Hasil Uji F ASB 08

dal	Sum of	ar	Maan Sauara	F	Sig.
	A. C.	1	Control of the Assessment		<.001b
Regressio		1		004,210	<.001
n	040032.000		040032.000		
Residual	14305888901	39	36681766413		
	33988.200		692.010		
Total	26528900324	40			
	174020.000				
	Residual	del Squares Regressio 25098311434 n 040032.000 Residual 14305888901 33988.200 Total 26528900324	del Squares df Regressio 25098311434 1 n 040032.000 Residual 14305888901 39 33988.200 Total 26528900324 40	del Squares df Mean Square Regressio 25098311434 1 25098311434 n 040032.000 040032.000 Residual 14305888901 39 36681766413 33988.200 692.010 Total 26528900324 40	del Squares df Mean Square F Regressio 25098311434 1 25098311434 684.218 n 040032.000 040032.000 Residual 14305888901 39 36681766413 33988.200 692.010 Total 26528900324 40

a. Dependent Variable: Total Anggaran

b. Predictors: (Constant), Jumlah Lampu

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan layak, dikarena nilai signifikan 0,001 dibawah nilai 0,05 namun tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi asumsi normalitas. Implikasinya adalah ASB Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

tidak dapat dilanjutkan. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya. Penyebabnya adalah:

- a) Data yang digunakan mungkin tidak akurat, tidak lengkap.
- b) Ukuran sampel terlalu kecil.
- c) Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, hasil model bisa menjadi tidak layak.
- d) Keberadaan outlier dapat menyebabkan hasil model menjadi bias, sehingga uji F menunjukkan model tidak signifikan.

Tabel 4.22. Hasil Uji t ASB 08

Mo	odel	Unstandardiz Coefficients B	std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3778814.18 3	1078916.16 8		-3.502	.001
	JumlahLamp u	260594.188	9962.483	.973	26.158	<.001

a. Dependent Variable: Total Anggaran

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa Jumlah lampu berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dikarenakan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05). Akan tetapi, ASB Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak dapat dianalis dengan model regresi linear berganda karena data tidak normal. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya.

Persamaan Y:

 $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$ a = -3.778.814,183b = 9.962,483

Sehingga:

Y = -3.778.814.183 + 9.962.483X

Keterangan:

Y = Total Anggaran

a = Biaya Tetap

b₁ = Biaya Variabel Jumlah Lampu

X = Jumlah Lampu

Simulasi:

Salah satu OPD 450 buah lampu, maka total anggaran untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah sebagai berikut:

$$Y = -3.778.814,183 + 9.962,483X$$

 $Y = -3.778.814,183 + 9.962,483(450)$
 $Y = 704.303,167$

Jadi, total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 704.303,167 \(

Dari kondisi di atas maka metode titik tertinggi dan titik terendah digunakan dalam menghasilkan ASB Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor:

Tabel 4.23. Hasil Uji Distribusi t ASB 08

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata-rata
Total Anggaran:			
Kelas 1	47,655,121	475,000	
Kelas 2	94,835,242		
Kelas 3	142,015,363	47,655,121	
		94,835,242	
Belanja Bahan Habis	83%	84%	83%
Pakai			
Belanja Jasa Kantor	18%	5%	14%
Jumlah			97%

ASB kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor menggunakan distribusi t dengan kategori . Rincian belanja, yaitu belanja bahan habis pakai memiliki nilai batas atas dan batas bawah tidak sesuai karena ketimpangan atau deviasi standar yang sangat tinggi antara data yang nilainya paling tinggi dan paling rendah.

Tabel 4.24. Daftar Kelas OPD ASB 08

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Pengadaan Barang & Jasa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seluruh SD, SMP, dan SMA, Rumah Sakit Umun Daerah Waibakul, Dinas PPO, Dinas Komunikasi dan Informatika, Seluruh Kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, UPTD Pengelola Air Minum, Sanggar Kegiatan Belajar, POLPP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Keuangan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Seluruh Puskesmas, Inspektorat, Dinas PRKPP
2	Bagian Umum, Dinas Pendidikan
3	Sekretariat Daerah

4.1.8 ASB 9: Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Deskripsi:

Kegiatan kedinasan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Kabupaten lain, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat.

Tabel 4.25. Hasil Uji Distribusi t ASB 09

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata-rata
Total Anggaran:			
Kelas 1	106,236,110	6,647,000	

Kelas 2	205,825,221	106,236,110			
Kelas 3	305,414,331	205,825,221			
Kelas 4	405,003,441	305,414,331			
Belanja Perjalanan Dinas 100% 100%					
Jumlah					

Tabel 4.26. Daftar Kelas OPD ASB 09

Kelas	Daftar OPD
1	Dinkes, RSUD, Dinas PPO, Dinas PUPR, Dinas PRKPP, Kesbangpol, POLPP, Dinsos, Dinas Perikanan, Dinas Transmigrasi, Dinas Pertanian, Sanggar Kegiatan Belajar, Badan Kepegawaian, Inspetorat, BKD, Bappelitbangda, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Kec. Mamboro, Kec. Katikutana Selatan, Kec. Katikutana, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Hukum, Sekretariat Korpri.
2	•
3	*
4	Bagian Umum

ASB kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah menggunakan distribusi t dengan kategori. Berdasarkan perhitungan dari rumus pembentukan kategori ditemukan 4 kelas atau kategori yang mana setiap kategori memuat OPD di dalamnya. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.9 ASB 10: Kegiatan Pembangunan Jembatan

Deskrpsi:

Kegiatan pembangunan jembatan dan atau perbaikan jembatan yang digunakan oleh masyarakat umum.

Tabel 4.27. Hasil Uji Distribusi t ASB 10

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata- rata	
Total Anggaran	5,060,537,074	103,707,000		
Belanja Barang Pakai Habis	1.28%	0.50%	1.21%	
Belanja Modal Jembatan	72.14%	48.78%	70.15%	
Belanja Modal Jalan	6.47%	0.00%	5.76%	
Belanja Honorarium	0.05%	0.12%	0.06%	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.76%	0.00%	18.51%	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.85%	0.00%	1.65%	
Jumlah				

ASB kegiatan Pembangunan Jembatan menggunakan distribusi t. Kegiatan ini cenderung dapat diterapkan karena hanya 1 OPD, yaitu Dinas PUPR dengan beberapa rincian belanja. Namun ASB ini sulit untuk dilakukan penyesuaian di masa yang akan datang (misalnya pernyesuaian dengan inflasi), karena ASB yang dapat disesuaikan hanya yang mengunakan metode regresi.

4.1.10 ASB 11: Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Deskripsi:

Kegiatan yang dilakukan oleh OPD untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan internal yang dilaksanakan OPD sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan, pemantauan/pengawasan, evaluasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 4.28. Hasil Uji Distribusi t ASB 11

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata-rata
Total Anggaran			
Kelas 1	166,653,491	1,400,000	
Kelas 2	331,906,983	166,653,491	
Kelas 3	497,160,475	331,906,983	
Belanja Bahan Pakai Habis	10.38%	14.07%	11.25%
Belanja Perjalanan Dinas dalam negeri	34.06%	52.00%	38.25%
Belanja Jasa Kantor	29.60%	0.00%	20.79%
Jumlah			70,29%

ASB kegiatan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan menggunakan distribusi t dengan kategori. Berdasarkan perhitungan dari rumus pembentukan kategori ditemukan 3 kelas atau kategori yang mana setiap kategori memuat OPD di dalamnya. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.29. Daftar Kelas OPD ASB 11

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan Inspektorat, DPMD, Bagian Administrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Inspektorat, Bapplitbangda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perhubungan, Puskesmas Weeluri Puskesmas Pahar, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian umum, Bagian hokum, Bagian organisasi, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kec. Umbu Ratu Nggay, Kec. Umbu Ratu Nggay Tengah, Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan
2	
3	Kesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup

4.1.11 ASB 12: Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Deskripsi:

Kegiatan yang meliputi memelihara, memperbaiki dan atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, dan bahan bangunan agar bangunan gedung kantor tetap dapat berfungsi.

Tabel 4.30. Hasil Uji Distribusi t ASB 12

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata- rata	
Total Anggaran	211,713,033.00	1,000,000.00		
Belanja Bahan Pakai Habis	13.20%	11.48%	12.98%	
Belanja Jasa Kantor	1.46%	0.00%	1.24%	
Belanja Pemeliharaan	47.42%	0.00%	33.85%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.32%	0.00%	32.82%	
Belanja Bahan/Material	16.27%	35.45%	18.76%	
Jumlah				

ASB kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.12 ASB 13: Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Deskripsi:

Kegiatan yang meliputi perawatan, perbaikan, dan penggantian suku cadang untuk kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 yang dimiliki oleh OPD.

Cost Driver: Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 3, Roda 4, dan Roda 6

Tabel 4.31. Hasil Uji Normalitas ASB 13

						Unstandardize d Residual
N						79
Normal Paran	netersa,b	1	Mean			.0000000
			Std. Devia	ation		114085447.91 557327
Most	Extr	eme	Absolute		.267	
Differences			Positive			.267
			Negative			225
Test Statistic						.267
Asymp. Sig. (2	2-tailed	c				<.001
Monte Carlo	Sig.	(2-	Sig.			<.001
tailed)d			99% Interval	Confidence	Lower Bound	.000
				Upper Bound	.000	

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas, karena nilai signifikannya (0,001) dibawah 0,05 (5%). Artinya adalah data menunjukkan ketidaknormalan data antara satu dengan yang lainnya. Penyebab ketidaknormalan data adalah nilai outliers. Outliers merupakan nilai ekstrim yang menyimpang dari pola distribusi data lainnya. Melanggar asumsi normalitas berarti ASB tidak dapat dipakai karena hasilnya tidak menjadi BLUE (Best Linier Unbias Estimator). Jika ASB dipakai, maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggaran. Hal ini juga dapat disebabkan karena jumlah data setiap cost driver tidak sama.

Data outliers dapat diatasi dengan cara menghilangkan data yang menyimpang dari distribusi. Namun sulit untuk dilakukan karena jumlah data sangat minim serta penghilangan data outliers tidak dapat dilakukan karena berpengaruh pada anggaran dan merugikan OPD sebab menghapus data outliers dapat menyebabkan hilangnya informasi dan hasil yang bias. Berikutnya, jika dari total data yang diolah ada OPD yang tidak mengumpulkan data akan dirugikan karena harus mengikuti OPD lainnya.

Tabel 4.32. Hasil Uji F ASB 13

		Sum of				
Model		Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24333967053	4	60834917633	44.343	<.0016
		57080600.000		9270140.000		
	Residual	10152081752	74	13719029395		
		35564800.000		075200.000		
	Total	34486048805	78			
		92645100.000				

a. Dependent Variable: Total Anggaran

b. Predictors: (Constant), Roda4, Roda1, Roda3, Roda2

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan layak, dikarena nilai signifikan 0,001 dibawah nilai 0,05 namun tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi asumsi normalitas. Implikasinya adalah ASB Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional tidak dapat dilanjutkan. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya. Penyebabnya adalah:

- a) Data yang digunakan mungkin tidak akurat, tidak lengkap.
- b) Ukuran sampel terlalu kecil.
- c) Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, hasil model bisa menjadi tidak layak.
- Keberadaan outlier dapat menyebabkan hasil model menjadi bias, sehingga uji
 F menunjukkan model tidak signifikan.

Tabel 4.33. Hasil Uji t ASB 13

	Unstandardize	ed Coefficients	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	В	Std. Error			
(Constant)	9094676.159	19092654.451		.476	.635
Roda 2	1229099.948	1220940.165	.065	1.007	.317
Roda 4	32613312.856	2845940.698	.756	11.460	<.001
Roda 3	-3675033.073	59686635.250	004	062	.951
Roda 6	64246577.392	20730608.558	.203	3.099	.003
	Roda 2 Roda 4 Roda 3	B (Constant) 9094676.159 Roda 2 1229099.948 Roda 4 32613312.856 Roda 3 -3675033.073	(Constant) 9094676.159 19092654.451 Roda 2 1229099.948 1220940.165 Roda 4 32613312.856 2845940.698 Roda 3 -3675033.073 59686635.250	Unstandardized Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 9094676.159 19092654.451 Roda 2 1229099.948 1220940.165 .065 Roda 4 32613312.856 2845940.698 .756 Roda 3 -3675033.073 59686635.250004	Unstandardized Coefficients B Std. Error Beta t (Constant) 9094676.159 19092654.451 .476 Roda 2 1229099.948 1220940.165 .065 1.007 Roda 4 32613312.856 2845940.698 .756 11.460 Roda 3 -3675033.073 59686635.250004062

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran. Sedangkan jumlah kendaraan roda 4 dan dan roda 6 berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dikarenakan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05 dan 0,011<0,05). Akan tetapi, ASB Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional tidak dapat dianalis dengan model regresi linear berganda karena pada data tidak normal. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya.

Persamaan Y:

 $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$

a = 9.094.676,159

 $b_1 = 1.229.099,948$

 $b_2 = 32.613.312,856$

 $b_3 = -3.675.033,073$

 $b_4 = 64.246.577,392$

Sehingga:

 $Y = 9.094.676,159 + 1.229.099,948X_1 + 32.613.312,856X_2 - 3.675.033,073X_3 + 64.246.577,392X_4$

Keterangan:

Y = Total Anggaran

a = Biaya Tetap

b₁ = Biaya Variabel Kendaraan Roda 2

b₂ = Biaya Variabel Kendaraan Roda 4

b₃ = Biaya Variabel Kendaraan Roda 3

b₄ = Biaya Variabel Kendaraan Roda 6

X₁ = Jumlah Kendaraan Roda 2

X₂ = Jumlah Kendaraan Roda 4

X₁ = Jumlah Kendaraan Roda 3

X4 = Jumlah Kendaraan Roda 6

Simulasi:

Salah satu OPD memiliki kendaraan dinas roda 2 sebanyak 4 dan roda 4 sebanyak 2. Sehingga, total anggaran yang dibutuhkan yaitu:

 $Y = 9.094.676,159 + 1.229.099,948X_1 + 32.613.312,856X_2 - 3.675.033,073X_3$

+ 64.246.577,392X4

Y = 9.094.676,159 + 1.229.099,948(4) + 32.613.312,856(2) - 3.675.033,073(0)

+ 64.246.577,392(0)

Y = 9.094.676,159 + 4.916.399,792 + 65.226.625,712

Y = 79.237.701,663

Jadi, total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 79.237.701,663

Dari kondisi di atas maka metode titik tertinggi dan titik terendah digunakan dalam menghasilkan ASB Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional:

—

Tabel 4.34. Hasil Uji Distribusi t ASB 13

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata- rata
Total Anggaran			
Kelas 1	212,752,312.50	1,681,500.00	
Kelas 2	423,823,125.00	212,752,312.5 0	
Belanja Bahan Pakai Habis	6.71%	0.24%	4.57%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.37%	93.52%	95.43%
Jumlah			100.00%

ASB kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.35. Daftar Kelas OPD ASB 13

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas Kesehatan, Seluruh Puskesmas, Dinas PPO, Dinas PRKPP, Kesbangpol, POLPP, Dinsos, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, DPMD, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, BKPSDM, Inspektorat, Protokol & Humas, Badan Keuangan Daerah, Balitbangda, Sekretariat DPRD, Badan Penanggulangan Bencana, Bagian Pemerintahan, Bagian Adm. Pembangunan, Bagian Organisasi, Seluruh Kecamatan, Bagian Perekonomian & SDA, Bagian Kesejahtaraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang & Jasa, Sekretariat Korpri, Seluruh SD, SMP, SMA, Sanggar Kegiatan Belajar
2	Bagian Umum, RSUD, Dinas PUPR

4.1.13 ASB 14: Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Deskripsi:

Kegiatan pendukung operasional perkantoran rutin dimana kegiatan ini terdiri dari perawatan perlengkapan gedung kantor (misalnya: AC, Jam dinding, dll).

Tabel 4.36. Hasil Uji Distribusi t ASB 14

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata-rata
Total Anggaran	10,000,000.00	2,052,000.00	
Belanja Pemeliharaan	88.68%	67.99%	93.70%
Belanja Bahan/Material	23.21%	0.00%	6.30%
Jumlah			100.00%

ASB Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor menggunakan distribusi t. Kegiatan ini cenderung dapat diterapkan karena hanya 5 OPD, yaitu Inspektorat, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas PRKPP, dan SMPN 6 Umbu Ratu Nggay dengan dua rincian belanja. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.14 ASB 15: Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Deskripsi:

Kegiatan pendukung operasional perkantoran rutin dimana kegiatan ini terdiri dari perawatan dan penggantian komponen peralatan gedung kantor.

Tabel 4.37. Hasil Uji Distribusi t ASB 15

	Maksimum	Minimum	Rata-rata
Total Anggaran	168,903,842.00	500,000.00	
Belanja Bahan Pakai Habis	25.59%	5.95%	18.79%
Belanja Makanan dan Minuman	1.98%	0.00%	0.87%
Belanja Perjalanan Dinas	19.39%	0.00%	11.49%
Belanja Bahan/Material	0.16%	0.00%	0.07%
Belanja Jasa Kantor	44.38%	0.00%	40.76%
Belanja Pemeliharaan	28.80%	21.28%	26.20%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.17%	0.53%	0.95%
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0.50%	0.00%	0.27%
Jumlah			100.00%

ASB kegiatan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.15 ASB 16: Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Deskripsi:

Kegiatan pendukung operasional perkantoran rutin dimana kegiatan ini terdiri dari pembayaran pajak, kir kendaraan, dan pengurusan surat kendaraan. ❤

Tabel 4.38. Hasil Uji Distribusi t ASB 16

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata-rata
Total Anggaran			
Kelas 1	317,868,290.00	1,106,960.00	
Kelas 2	634,629,620.00	317,868,290.00	
Kelas 3	951,390,950.00	634,629,620.00	
Kelas 4	1,268,152,280.00	951,390,950.00	
Kelas 5	1,584,913,610.00	1,268,152,280.00	
Belanja Jasa Kantor	26.99%	18.89%	23.96%
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11.15%	10.09%	10.75%
Belanja Bahan Pakai Habis	60.32%	63.74%	61.60%
Belanja iuran jaminan/asuransi	0.59%	0.29%	0.48%
Jumlah			96.79%

ASB kegiatan kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasionalmenggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.39. Daftar Kelas OPD ASB 16

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas Kesehatan, Seluruh Puskesmas, Dinas PPO, Dinas PRKPP, Kesbangpol, POLPP, Dinsos, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, DPMD, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, BKPSDM, Inspektorat, Protokol & Humas, Badan Keuangan Daerah, Balitbangda, Sekretariat DPRD, Badan Penanggulangan Bencana, Bagian Pemerintahan, Bagian Adm. Pembangunan, Bagian Organisasi, Seluruh Kecamatan, Bagian Perekonomian & SDA, Bagian Kesejahtaraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang & Jasa, Sekretariat Korpri, Seluruh SD, SMP, SMA, Sanggar Kegiatan Belajar
2	Dinas Pertanian, RSUD
3	
4	Bagian Umum,
5	Sekretariat Daerah

4.1.16 ASB 17: Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Deskripsi:

Kegiatan pendukung operasional perkantoran rutin dimana kegiatan ini terdiri dari memperbaiki peralatan kerja (contoh: komputer, laptop, dan printer). \checkmark

Tabel 4.40. Hasil Uji Distribusi t ASB 17

Keterangan	Batas Maksimal	Ratas Minimal	
Total Anggaran			
Kelas 1	239,966,483.33	1,000,000.00	
Kelas 2	478,932,966.67	239,966,483.33	
Kelas 3	717,899,450.00	0.00 478,932,966.67	
Belanja Bahan Pakai Habis	15.52%	3.27%	15.36%
Belanja Pemeliharaan	3.33%	0.00%	6.08%
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	50.44%	0.00%	39.46%
Belanja Jasa Kantor	49.50%	0.00%	37.29%
Jumlah			98.20%

ASB kegiatan kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.41. Daftar Kelas OPD ASB 17

Kelas	Daftar OPD
1	Seluruh SD, SMP, SMA, Dinas PRKPP, KESBANGPOL, POLPP, Balitbang, Bagian Pemerintahan, Dinas lingkungan hidup, Bagian Hukum, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Kecamatan Mamboro
2	
3	Bagian Umum, Sekretariat Daerah

4.1.17 ASB 18: Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin

Deskripsi:

Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin oleh OPD yang digunakan oleh OPD atau masyarakat umum.

Tabel 4.42. Hasil Uji Distribusi t ASB 18

Keterangan	Batas Maksimal	Batas Minimal	Rata-rata
Total Anggaran			
Kelas 1	2,063,616,273.17	550,000	
Kelas 2	4,126,682,546.33	2,063,616,273	
Kelas 3	6,189,748,819.50	4,126,682,546	
Kelas 4	8,252,815,092.67	6,189,748,820	
Kelas 5	10,315,881,365.8 3	8,252,815,093	
Kelas 6	12,378,947,639.0 0	10,315,881,366	
Belanja Bahan Pakai Habis	26.61%	23.79%	25.81%
Belanja Jasa Kantor	3.11%	2.15%	2.84%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0.97%	0.19%	0.75%
Belanja Modal peralatan dan	32.78%	7.15%	25.46%

Belanja Bahan dan Material	6.42%	0.00%	3.72%
Belanja Modal Alat Kantor	0.77%	0.22%	0.62%
Belanja modal alat rumah	9.11	O Table 70	0.0270
tangga	2.52%	1.40%	2.20%
Belanja modal alat pengolahan	0.23%	0.00%	0.14%
Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat	0.48%	0.11%	0.38%
Belanja modal alat angkut darat bermotor	0.55%	0.00%	0.33%
Belanja modal alat studio	0.31%	0.00%	0.19%
Belanja modal komputer unit	14.99%	0.00%	8.07%
Belanja modal peralatan komputer	0.98%	0.57%	0.86%
Belanja iuran jaminan/asuransi	0.11%	0.03%	0.09%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.94%	0.00%	0.93%
Belanja modal alat Kesehatan	35.44%	0.00%	20.09%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0.53%	0.00%	0.28%
Belanja Modal Alat Kedokteran	10.74%	0.00%	5.17%
Belanja Modal Sumur	0.13%	0.00%	0.06%
Belanja modal alat peraga sekolah	0.32%	0.00%	0.15%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.82%	0.00%	0.40%
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.50%	0.00%	0.72%
Belanja Modal Alat Komunikasi	0.01%	0.00%	0.00%
Belanja Modal Alat Bantu	0.58%	0.00%	0.28%
Belanja Modal Personal Computer	0.03%	0.00%	0.02%
Belanja Modal Jaringan Air Minum	0.25%	0.00%	0.12%
Jumlah			99,69%

ASB kegiatan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.43. Daftar Kelas OPD ASB 18

Kelas	Daftar OPD
1	Seluruh SD, SMP, SMA, Seluruh Kecamatan, Dinas Lainnya
2	
3	
4	Dinas Kesehatan, Dinas PPO
5	
6	RSUD

4.1.18 ASB 19: Kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan

Deskripsi:

Kegiatan pembangunan dan atau rehabilisasi gedung yang dibutuhkan oleh OPD atau masyarakat umum yang mencakup bangunan gedung, ruang, pagar, dan komponen lain yang berhubungan langsung dengannya agar gedung tersebut dapat berfungsi termasuk instalasi listrik.

Cost Driver: Jumlah gedung yang dibangun

Tabel 4.44. Hasil Uji Distribusi Normal ASB 19

			Unstandardized Residual
N			60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0000001
	Std. Deviation		4370759414.64
			711950
Most Extreme Differences	Absolute		.330
	Positive		.330
	Negative		309
Test Statistic			.330
Asymp. Sig. (2-tailed)c			<.001
Monte Carlo Sig. (2-tailed)d	Sig.		<.001
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.000

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas, karena nilai signifikannya (0,000) dibawah 0,05 (5%). Artinya adalah data menunjukkan ketidaknormalan data antara satu dengan yang lainnya. Penyebab ketidaknormalan data adalah nilai outliers. Outliers merupakan nilai ekstrim yang menyimpang dari pola distribusi data lainnya. Melanggar asumsi normalitas berarti ASB tidak dapat dipakai karena hasilnya tidak menjadi BLUE (Best Linier Unbias Estimator). Jika ASB dipakai, maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggaran.

Data outliers dapat diatasi dengan cara menghilangkan data yang menyimpang dari distribusi. Namun sulit untuk dilakukan karena jumlah data sangat minim serta penghilangan data outliers tidak dapat dilakukan karena berpengaruh pada anggaran dan merugikan OPD sebab menghapus data outliers dapat menyebabkan hilangnya informasi dan hasil yang bias. Berikutnya, jika dari total data yang diolah ada OPD yang tidak mengumpulkan data akan dirugikan karena harus mengikuti OPD lainnya.

Tabel 4.45. Hasil Uji F ASB 19

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	203580071545392 3330.000	1	203580071545 3923330.000	.105	.747b
	Residual	112710873378285 8700000.000	58	194329092031 52736000.000		
	Total	112914453449831 2600000.000	59			

a. Dependent Variable: Total Anggaran

b. Predictors: (Constant), Jumlah Yang dibangun 🛶

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak layak, dikarena nilai signifikan 0,105 di atas nilai 0,05 namun tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi asumsi normalitas. Implikasinya adalah ASB Kegiatan: Pembangunan Gedung dan Bangunan tidak dapat dilanjutkan. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya.

Penyebabnya adalah:

- a) Data yang digunakan mungkin tidak akurat, tidak lengkap.
- b) Ukuran sampel terlalu kecil.
- c) Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, hasil model bisa menjadi tidak layak.
- d) Keberadaan outlier dapat menyebabkan hasil model menjadi bias, sehingga uji F menunjukkan model tidak signifikan.

Tabel 4.46. Hasil Uji t ASB 19

34-1-1				Unstandardized	Coefficients Std. Error	Standar dized Coefficie nts Beta		Sig.
Model				B	Std. Effor	Beta	t	oig.
1	(Constan	it)		1848040621.474	655061478.018		2.821	.007
	Jumlah Bangun	Yang	di	12548825.477	38770763.974	.042	.324	.747

a. Dependent Variable: Total Anggaran

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa Jumlah gedung yang dibangun tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran Pembangunan Gedung dan Bangunan dikarenakan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (0,747<0,05). Akan tetapi, ASB Kegiatan: Pembangunan Gedung dan Bangunan tidak dapat dianalis dengan model regresi linear berganda karena data tidak normal. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya.

Persamaan Y:

 $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$ a = 1.848.040.621,474b = 12.548.825,477

Sehingga:

Y = 1.848.040.621,474 + 12.548.825,477X

Keterangan:

Y = Total Anggaran

a = Biaya Tetap

b = Biaya Variabel Jumlah Gedung yang dibangun

X = Jumlah Gedung yang dibangun

Simulasi:

Salah satu OPD membangun 1 buah gedung untuk operasional kantor. Sehingga, total anggaran yang dibutuhkan yaitu:

Y = 1.848.040.621,474 + 12.548.825,477XY = 1.848.040.621,474 + 12.548.825,477(1)

Jadi, total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.860.589.446,951

Dari kondisi di atas maka metode titik tertinggi dan titik terendah digunakan dalam menghasilkan ASB Kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan:

Tabel 4.47. Hasil Uji Distribusi t ASB 19

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata- rata
Total Anggaran			
Kelas 1	4,396,103,961	436,000	
Kelas 2	8,791,771,922	4,396,103,961	
Kelas 3	13,187,439,883	8,791,771,922	
Kelas 4	17,583,107,844	13,187,439,883	
Kelas 5	21,978,775,805	17,583,107,844	
Kelas 6	26,374,443,766	21,978,775,805	
Belanja Bahan Pakai Habis	5.31%	0.00%	2.97%
Belanja Perjalanan Dinas	1.25%	1.06%	1.19%
Honorarium PNS	0.18%	0.04%	0.14%
Honorarium non PNS	0.33%	0.13%	0.27%
Belanja Jasa Kantor	2.39%	1.56%	2.16%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.52%	14.68%	24.62%
Belanja barang untuk diserahkan kepada masy/pihak ketiga	10.91%	0.13%	7.87%
Belanja jasa konsultasi konstruksi	1.13%	0.00%	0.68%
Belanja jasa konsultasi non konstruksi	0.01%	0.00%	0.01%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	42.64%	21.29%	36.63%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.12%	0.00%	0.60%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.25%	0.00%	0.13%
Jumlah			77,27%

ASB kegiatan kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.48. Daftar Kelas OPD ASB 19

Kelas	Daftar OPD
1	Seluruh SD, SMP, SMA, Seluruh Kecamatan, Dinas Lainnya
2	Dinas PPO
3	RSUD, PUPR, Seluruh Puskesmas
4	

5		
6	Dinas Kesehatan,	

4.1.19 ASB 20: Kegiatan Pembangunan Jalan

Deskripsi:

Kegiatan pembangunan jalan dan atau perbaikan jalan yang digunakan oleh masyarakat umum.

Tabel 4.49. Hasil Uji Distribusi t ASB 20

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata-rata
Total Anggaran			
Kelas 1	201,787,400	28,963,206	
Kelas 2	81,155,379,250	201,787,400	
Belanja Bahan Pakai Habis	0.08%	0.05%	0.08%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0.01%	0.00%	0.01%
Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	0.00%	0.00%
Belanja Perjalanan Dinas	1.66%	3.27%	1.75%
Belanja Jasa Kantor	0.09%	0.21%	0.10%
Belanja Honorarium	0.01%	0.00%	0.01%
Belanja modal jalan	94.66%	12.51%	90.06%
Honorarium PNS	0.02%	0.00%	0.02%
Belanja Modal Jalan, irigasi, dam jaringan pengadaan jalan	9.78%	0.00%	7.68%
Belanja Modal gedung dan bangunan	0.16%	0.00%	0.11%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0.00%	0.00%	0.00%
Belanja Modal Jembatan	0.06%	0.00%	0.04%
Jumlah			99.85%

ASB kegiatan kegiatan Pembangunan Jalan menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.50. Daftar Kelas OPD ASB 20

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas Perhubungan
2	Dinas PUPR

4.1.20 ASB 21: Kegiatan Pembangunan Jembatan

Deskripsi:

Kegiatan pembangunan jembatan dan atau perbaikan jembatan yang digunakan oleh masyarakat umum.

Tabel 4.51. Hasil Uji Distribusi t ASB 21

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata- rata
Total Anggaran	Rp5,060,537,074	Rp103,707,000	
Belanja Barang Pakai Habis	1.28%	0.50%	1.21%
Belanja Modal Jembatan	72.14%	48.78%	70.15%
Belanja Modal Jalan	6.47%	0.00%	5.76%
Belanja Honorarium	0.05%	0.12%	0.06%
Belanja Jasa Kantor	0.35%	0.00%	0.31%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.76%	0.00%	18.51%
Belanja Modal Peralatan Komputer	2.60%	0.00%	2.32%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0.02%	0.00%	0.02%
Belanja Makanan dan Minuman	0.01%	0.00%	0.01%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.85%	0.00%	1.65%
Jumlah			100%

ASB kegiatan kegiatan Pembangunan Jembatan menggunakan distribusi t dengan kategori. Kegiatan ini umumnya hanya dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.21 ASB 22: Kegiatan Pembangunan Irigasi dan Jaringan

Deskripsi:

Kegiatan pembangunan irigasi dan jaringan dan atau perbaikan irigasi dan jaringan yang digunakan oleh masyarakat umum.

Tabel 4.52. Hasil Uji Distribusi t ASB 22

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata-rata
Total Anggaran	12,330,435,198	Rp42,107,000	
Bahan Habis Pakai	27.18%	0.00%	14.37%
Belanja Jasa Kantor	2.22%	0.00%	1.84%
Belanja Perjalanan Dinas	5.41%	4.83%	5.33%
Belanja Modal Jalan	2.63% 0.28%	0.00%	1.35%
Belanja Honorarium			
Belanja Modal Jaringan Air Minum	56.20%	9.74%	50.07%
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0.11%	0.00%	0.06%

Belanja Modal Alat Ukur	0.19%	0.00%	0.07%
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	64.91%	0.00%	24.16%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0.55%	0.00%	0.14%
Jumlah			97,61

ASB kegiatan kegiatan Pembangunan Irigasi dan Jaringan menggunakan distribusi t dengan kategori. Kegiatan ini umumnya hanya dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan UPTD Pengelola Air Minum. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.22 ASB 23: Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas

Deskripsi:

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas oleh OPD yang digunakan oleh OPD dan atau masyarakat umum.

Tabel 4.53. Hasil Uji Distribusi t ASB 23

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata- rata
Total Anggaran			
Kelas 1	Rp346,877,667	Rp25,100,000	
Kelas 2	Rp668,655,333	Rp346,877,667	
Kelas 3	Rp990,433,000	Rp668,655,333	
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	75.39%	0.00%	54.52%
Belanja Barang Pakai Habis	1.24%	0.00%	0.73%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	54.25%	0.00%	43.24%
Jumlah			98,49%

ASB kegiatan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.54. Daftar Kelas OPD ASB 23

Kelas	Daftar OPD	
1	Dinas PPO, Bagian Pemerintahan, UPTD Pengelola Air Minum	
2	Dinkes	
3	RSUD, POLPP	

4.1.23 ASB 24: Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat

Deskripsi:

Kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan OPD dan dilaksanakan dalam Kabupaten untuk mencapai kemampuan atau keahlian tertentu. Kegiatan tersebut melibatkan peserta baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat umum.

Tabel 4.55. Hasil Uji Distribusi t ASB 24

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata- rata
Total Anggaran	Rp318,915,600	Rp11,160,000	
Bahan habis pakai	33.41%	6.54%	25.20%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.78%	14.00%	19.41%
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.89%	0.18%	3.45%
Belanja Jasa Kantor	33.05%	10.33%	26.11%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.29%	1.01%	5.37%
Honorarium PNS	15.01%	0.00%	8.77%
Honorarium Non PNS	11.04%	0.00%	5.99%
Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	0.21%	0.00%	0.11%
Belanja sewa peralatan dan mesin	0.62%	0.00%	0.28%
Jumlah			94,69%

ASB kegiatan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.24 ASB 25: Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

Deskripsi:

Kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan OPD dan dilaksanakan dalam Kabupaten untuk mencapai kemampuan atau keahlian tertentu. Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari instansi pemerintah.

Tabel 4.56. Hasil Uji Distribusi t ASB 25

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata- rata	
Total Anggaran				
Kelas 1	Rp1,598,768,662	Rp4,865,000		
Kelas 2	Rp3,192,672,324	Rp1,598,768,662		
Kelas 3	Rp4,786,575,986	Rp3,192,672,324		
Kelas 4	Rp6,380,479,648	Rp4,786,575,986		
Kelas 5	Rp7,974,383,310	Rp6,380,479,648		
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan	17.13%	0.00%	10.56%	

Pelatihan			
Belanja Jasa Kantor	83.27%	0.00%	73.60%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.55%	0.00%	6.52%
Belanja Barang Pakai Habis	0.41%	2.03%	0.52%
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	8.96%	0.00%	5.36%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0.06%	0.00%	0.05%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.74%	0.00%	3.23%
belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	0.02%	0.00%	0.02%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.03%	0.00%	0.02%
Jumlah			99.88%

ASB kegiatan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.25 ASB 26: Kegiatan Bimbingan Teknis

Deskripsi:

Kegiatan untuk memberikan bimbingan teknis yang diselenggarakan OPD dan dilaksanakan dalam Kabupaten untuk memperoleh keahlian teknis tertentu untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama.

Tabel 4.57. Hasil Uji Distribusi t ASB 26

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata-rata	
Total Anggaran				
Kelas 1	Rp1,058,106,040	Rp17,004,000		
Kelas 2	Rp2,099,208,080	Rp1,058,106,040		
Bahan habis pakai	1.82%	9.12%	2.04%	
Belanja perjalanan dinas dalam negeri	87.10%	0.00%	81.41%	
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.16%	0.00%	10.11%	
Jumlah		- In-	93,56%	

ASB kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan u

dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.58. Daftar Kelas OPD ASB 23

Kelas	Daftar OPD
1	Bagian Hukum, Dinas Perikanan, BKD, Dinas Kependudukan
2	Sekretariat DPRD

4.1.26 ASB 27: Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Tingkat OPD / Kecamatan / Kelurahan / Desa

Deskripsi:

Kegiatan pemberian bantuan teknis atau non-teknis yang dilakukan oleh OPD dalam rangka memfasilitasi kegiatan perencanaan, pelayanan, pengembangan program tertentu baik di tingkat OPD maupun di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa yang diberikan kepada ASN maupun masyarakat.

Tabel 4.59. Hasil Uji Distribusi t ASB 27

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata-rata
Total			
Kelas 1	Rp1,227,491,107	Rp860,000	
Kelas 2	Rp2,454,122,215	Rp1,227,491,107	
Kelas 3	Rp3,680,753,322	Rp2,454,122,215	
Kelas 4	Rp4,907,384,429	Rp3,680,753,322	
Kelas 5	Rp6,134,015,536	Rp4,907,384,429	
Kelas 6	Rp7,360,646,644	Rp6,134,015,536	
Kelas 7	Rp8,587,277,751	Rp7,360,646,644	
Belanja Bahan Pakai Habis	22.73%	17.02%	21.25%
Belanja Jasa Kantor	7.10%	8.94%	7.58%
Belanja Perjalanan Dinas	19.49%	27.14%	21.47%
Nara sumber/ tenaga Ahli	0.07%	0.00%	0.03%
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.09%	0.00%	0.46%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.90%	0.00%	9.21%
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.20%	0.00%	1.25%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0.21%	0.00%	0.14%
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0.24%	0.09%	0.20%
Belanja sewa peralatan dan mesin	0.68%	0.00%	0.49%
Belanja Hibah kepada	16.42%	0.00%	6.85%

Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	
Jumlah	68,93%

ASB kegiatan kegiatan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Tingkat OPD / Kecamatan / Kelurahan / Desa menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.60. Daftar Kelas OPD ASB 27

Kelas	Daftar OPD
1	DPMD, PRKPP, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Dinas Kependudukan, Bappelitbangda, Seluruh Bagian, Seluruh Kecamatan
2	Bagian Kesejahteraan Sosial
3	
4	
4 5 6	
6	
7	Sekretariat Daerah

4.1.27 ASB 28 Kegiatan Pembinaan, Pendampingan, Pemberdayaan Masyarakat / Lembaga, Penataan, Pembentukan Kelompok

Deskripsi:

Kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain (kelompok bersama) untuk mempermudah tugas/kegiatan yang bersifat kemasyarakatan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah dalam satu tahun anggaran.

Tabel 4.61. Hasil Uji Distribusi t ASB 28

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata-rata	
Total Anggaran				
Kelas 1	919,515,833	460,147,917		
Kelas 2	1,378,883,750	919,515,833		
Kelas 3	1,838,251,667	1,378,883,750		
Kelas 4	2,297,619,583	1,838,251,667		
Kelas 5	2,756,987,500	2,297,619,583		
Belanja Bahan Pakai Habis	45.06%	26.26%	40.12%	
Belanja Jasa Kantor	25.32%	8.34%	20.86%	
Belanja Perjalanan Dinas	15.45%	15.63%	15.50%	
Honorarium PNS	6.49%	0.00%	4.39%	
Honorarium Non PNS	7.69%	0.00%	4.73%	

Belanja Bahan Material	3.51%	0.00%	2.44%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.03%	0.00%	0.02%
Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	3.54%	0.22%	2.67%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.51%	0.00%	0.94%
Jumlah			91,67%

ASB kegiatan Kegiatan Pembinaan, Pendampingan, Pemberdayaan Masyarakat / Lembaga, Penataan, Pembentukan Kelompok menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.62. Daftar Kelas OPD ASB 28

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, DPMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, BKAD
2	
3	
4	
5	Dinas Pertanian, Dinas PPO

4.1.28 ASB 29: Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat/Instansi

Deskripsi:

Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses pembelajaran atau transfer pengetahuan, dan keahlian. Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada aparatur dan masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh OPD.

Tabel 4.63. Hasil Uji Distribusi t ASB 29

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata-rata
Total Anggaran	245,115,000	522,500	
Belanja Bahan Pakai Habis	20.70%	13.42%	18.24%
Belanja Jasa Kantor	40.16%	13.35%	31.10%
Belanja Perjalanan Dinas	36.77%	0.00%	29.38%
Honor PNS	4.08%	0.00%	2.66%
Honor Non PNS	2.79%	0.00%	1.56%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.54%	0.00%	1.01%
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.45%	0.00%	3.78%

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.78%	0.00%	2.07%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0.47%	0.00%	0.26%
Jumlah			90,06%

ASB kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat/Instansi menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.29 ASB 30: Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Rapat, Musyawarah, Dialog Dalam Daerah

Deskripsi:

Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun masukan-masukan atau membahas hal tertentu dalam pelaksanaan kegiatan baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan OPD atau merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan OPD di tingkat kecamatan/desa.

Tabel 4.64. Hasil Uji Distribusi t ASB 30

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata- rata
Total Anggaran			
Kelas 1	661,244,879.00	1,059,500	
Kelas 2	1,321,430,258.00	661,244,879.00	
Kelas 3	1,981,615,637.00	1,321,430,258.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	73.01%	52.12%	64,85%
Belanja Barang Pakai Habis	12.02%	6.95%	10.04%
Honorarium PNS	1.41%	0.60%	1.09%
Honorarium Non PNS	2.73%	0.00%	1.30%
Jumlah			77,280%

ASB kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Rapat, Musyawarah, Dialog Dalam Daerah menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.65 Daftar Kelas OPD ASB 30

Kelas	Daftar OPD	
1	Dinas Lainnya, Seluruh Kecamatan, Seluruh SD-SMP	
2	Balitbangda, Dinas Lingkungan	
3	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD	

4.1.30 ASB: Kegiatan Penyelenggaraan Acara Secara Massal

Deskripsi:

Kegiatan yang dilakukan OPD dalam kabupaten yang melibatkan instansi pemerintah maupun masyarakat umum, seperti: pameran, lomba/kompetisi, promosi, festival, perayaan dll yang berskala lokal.

Tabel 4.66. Hasil Uji Distribusi t ASB 31

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata- rata	
Total Anggaran	364,692,600	6,824,800		
Honorarium PNS	2.75%	0.00%	1.76%	
Honorarium Non PNS	3.56%	0.00%	2.40%	
Belanja Bahan Pakai Habis	10.44%	1.70%	9.64%	
Belanja Bahan/Material	3.35%	0.14%	3.06%	
Belanja Jasa Kantor	12.48%	6.42%	11.93%	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.28%	0.00%	7.15%	
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.80%	0.00%	0.49%	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.53%	0.00%	5.85%	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0.20%	0.00%	0.12%	
Belanja Cetak dan Penggandaan	2.27%	0.00%	1.82%	
Belanja Makanan dan Minuman	11.34%	0.00%	8.69%	
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.31%	0.00%	16.20%	
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.60%	0.00%	0.98%	
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.20%	0.00%	0.12%	
Jumlah			70.21%	

ASB kegiatan Penyelenggaraan Acara Secara Massal menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.31 ASB 32: Kegiatan Seminar, Workshop, Lokakarya, Talkshow, dan Diskusi

Deskripsi:

Kegiatan yang diselenggarakan OPD dalam kabupaten yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan atau membekali peserta dengan kemampuan tertentu yang sesuai dengan tujuan dari kegiatan tersebut. γ

Tabel 4.67. Hasil Uji Distribusi t ASB 32

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata-rata	
Total Anggaran	126,198,000	2,505,000		
Belanja Barang Pakai Habis	17.76%	0.00%	14.57%	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.20%	0.00%	25.17%	
Belanja Jasa Kantor	44.16%	0.00%	26.15%	
Honorarium PNS	3.10%	0.00%	1.84%	
Honorarium Non PNS	1.37%	0.00%	0.81%	
Uang Lembur	8.27%	0.00%	4.90%	
Jumlah			73,44%	

ASB kegiatan Seminar, Workshop, Lokakarya, Talkshow, dan Diskusi menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.32 ASB 33: Kegiatan Pengadaan Bahan Material

Deskripsi:

Kegiatan yang diadakan oleh OPD untuk menghadirkan material yang pemanfaatan kurang dari satu tahun karena adanya kebutuhan tertentu untuk mendukung aktivitas OPD secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Tabel 4.68. Hasil Uji Distribusi t ASB 33

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata- rata
Total Anggaran			
Kelas 1	206,361,000.00	220,000.00	
Kelas 2	412,502,000.00	206,361,000.00	
Kelas 3	618,643,000.00	412,502,000.00	
Kelas 4	824,784,000.00	618,643,000.00	
Kelas 5	1,030,925,000.00	824,784,000.00	
Belanja Barang Pakai Habis	78.09%	44.54%	70.04%
Belanja Jasa Kantor	21.22%	14.68%	19.65%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0.61%	0.00%	0.43%
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0.03%	0.00%	0.01%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	0.23%	0.00%	0.12%
Jumlah			90.25%

ASB kegiatan Pengadaan Bahan Material menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama. \(\varphi\)

Tabel 4.69. Daftar Kelas OPD ASB 33

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas Lainnya, Seluruh Kecamatan, Seluruh SD-SMP
2	BPBD
3	Sekretariat Daerah
4	
5	Bagian Umum

4.1.33 ASB 34: Kegiatan Operasi Penegakan Hukum / Peraturan Daerah

Deskripsi:

Kegiatan yang dilakukan oleh OPD yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum/perda karena statusnya yang memiliki kewenangan atas suatu peraturan perundangan.

Tabel 4.70. Hasil Uji Distribusi t ASB 34

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata-rata
Total Anggaran			
Kelas 1	732,328,500	11,045,000	
Kelas 2	1,453,612,000	732,328,500	
Kelas 3	2,174,895,500	1,453,612,000	
Honorarium PNS	1.58%	0.00%	0.95%
Belanja Barang Pakai Habis	4.91%	3.91%	4.80%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0.03%	0.00%	0.02%
Belanja Makanan dan Minuman	0.10%	0.00%	0.06%
Belanja Jasa Kantor	78.92%	17.18%	72.29%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.59%	47.21%	18.98%
Belanja Perjalanan	2.10%	0.00%	1.44%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.12%	0.00%	0.07%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.84%	0.00%	1.39%
Jumlah			100.00%

ASB kegiatan Operasi Penegakan Hukum / Peraturan Daerah menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.71. Daftar Kelas OPD ASB 34

Kelas	Daftar OPD							
1	Inspektorat, PUPR	UPTD	PAM,	Dinas	Perikanan,	Kec.	Katikutana,	Dinas
2								

2	SATPOLPP	
0	SAIFOLFF	

4.1.34 ASB 35: Kegiatan Penyusunan Dokumen Peraturan, Perencanaan, Laporan, dan Prosedur

Deskripsi:

Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dalam rangka menyusun dokumen seperti laporan keuangan, Peraturam Daerah / Peraturan Bupati, Renja OPD, dan lainnya.

Cost Driver: Jumlah Durasi, Jumlah Orang, Jumlah Eksemplar Dokumen

Tabel 4.72. Hasil Uji Normalitas ASB 35

						Unstandardize d Residual
N						38
Normal Parame	tersa,b		Mean			.0000000
			Std. Devia	tion		175884301.05 087912
Most	Extre	me	Absolute			.226
Differences			Positive			.226
			Negative			169
Test Statistic						.226
Asymp. Sig. (2-	tailed)					<.001
Monte Carlo			Sig.			<.001
tailed)d			99% Interval	Confidence	Lower Bound	.000
					Upper Bound	.000

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas, karena nilai signifikannya (0,000) dibawah 0,05 (5%). Artinya adalah data menunjukkan ketidaknormalan data antara satu dengan yang lainnya. Penyebab ketidaknormalan data adalah nilai outliers. Outliers merupakan nilai ekstrim yang menyimpang dari pola distribusi data lainnya. Melanggar asumsi normalitas berarti ASB tidak dapat dipakai karena hasilnya tidak menjadi BLUE (Best Linier Unbias Estimator). Jika ASB dipakai, maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggaran.

Data outliers dapat diatasi dengan cara menghilangkan data yang menyimpang dari distribusi. Namun sulit untuk dilakukan karena jumlah data sangat minim serta penghilangan data outliers tidak dapat dilakukan karena berpengaruh pada anggaran dan merugikan OPD sebab menghapus data outliers dapat menyebabkan hilangnya informasi dan hasil yang bias. Berikutnya, jika dari total data yang diolah ada OPD yang tidak mengumpulkan data akan dirugikan karena harus mengikuti OPD lainnya.

Tabel 4.73. Hasil Uji F ASB 35

		Sum of	8				
Model		Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	88914192162	3	29638064054	.880	.461b	
		332928.000		110976.000			

Residual	11446056321 77782270.000	34	33664871534 640656.000
Total	12335198243	37	
	40115200.000		

a. Dependent Variable: Total Anggaran

b. Predictors: (Constant), Jumlah Durasi, Jumlah Orang, Jumlah Eksemplar
 Dokumen

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak layak, dikarena nilai signifikan 0,461 di atas nilai 0,05 namun tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi asumsi normalitas. Implikasinya adalah ASB Kegiatan: Penyusunan Dokumen Peraturan, Perencanaan, Laporan, dan Prosedur tidak dapat dilanjutkan. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya. Penyebabnya adalah:

- a) Data yang digunakan mungkin tidak akurat, tidak lengkap.
- b) Ukuran sampel terlalu kecil.
- c) Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, hasil model bisa menjadi tidak layak.
- d) Keberadaan outlier dapat menyebabkan hasil model menjadi bias, sehingga uji F menunjukkan model tidak signifikan.

Tabel 4.74. Hasil Uji t ASB 35

		Unstandardized	Coefficients	Standardi zed Coefficien ts		
Mo	odel	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	28984734.731	236069207.513		.123	.903
	Jumlah Eksemplar Dokumen	-2220772.247	1865555.557	212	-1.190	.242
	Jumlah Orang	-22864.277	79403.571	048	288	.775
	Jumlah Durasi	11960284.381	19832375.732	-107	.603	.550

a. Dependent Variable: Total Anggaran

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa Jumlah Eksemplar, Jumlah Orang, dan Jumlah Durasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran Penyusunan Dokumen Peraturan, Perencanaan, Laporan, dan Prosedur dikarenakan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,242>0,05; 0,775>0,05; dan 0,550>0,05). ASB Kegiatan: Penyusunan Dokumen Peraturan, Perencanaan, Laporan, dan Prosedur tidak dapat dianalis dengan model regresi linear berganda karena data tidak normal. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya.

Persamaan Y:

 $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$ a = 28.984.734,731

 $b_1 = -2.220.772,247$

 $b_2 = -22.864,277$

b₃ = 11.960.284,381 \

Sehingga:

 $Y = 28.984.734,731 + -2.220.772,247X_1 + -22.864,277X_2 + 11.960.284,381X_3$

Keterangan:

Y = Total Anggaran

a = Biaya Tetap

b₁ = Biaya Variabel Jumlah Eksemplar

b₂ = Biaya Variabel Jumlah Orang

b₃ = Biaya Variabel Jumlah Durasi

X1 = Jumlah Eksemplar

X2 = Jumlah Orang

X₃ = Jumlah Durasi

Simulasi:

Salah satu OPD melakukan penyusunan dokumen untuk 1 tahun dengan jumlah eksemplar dokumen sebanyak 2 dan jumlah orang yang menyusun sebanyak 10 orang, maka total anggaran yang dibutuhkan adalah sebanyak:

$$Y = 28.984.734,731 + -2.220.772,247X_1 + -22.864,277X_2 + 11.960.284,381X_3$$

 $Y = 28.984.734,731 + -2.220.772,247(2) + -22.864,277(10) + 11.960.284,381(12)$
 $Y = 28.984.734,731 + -4.441.544,494 + -228.642,770 + 143.523.412,572$
 $Y = 167.837.960,039$

Jadi, total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 167.837.960,039

Dari kondisi di atas maka metode titik tertinggi dan titik terendah digunakan dalam menghasilkan ASB Kegiatan Penyusunan Dokumen Peraturan, Perencanaan, Laporan, dan Prosedur:

Tabel 4.75. Hasil Uji Distribusi t ASB 35

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata- rata
Total Anggaran			
Kelas 1	765,505,408	500,000	
Kelas 2	1,530,510,815	765,505,408	
Kelas 3	2,295,516,223	1,530,510,815	
Kelas 4	3,060,521,630	2,295,516,223	
Kelas 5	3,825,527,038	3,060,521,630	
Kelas 6	4,590,532,445	3,825,527,038	
Kelas 7	5,355,537,853	4,590,532,445	
Belanja Barang Pakai Habis	17.26%	19.26%	17.90%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.96%	20.72%	16.80%
Honorarium PNS	3.93%	3.30%	3.73%
Honorarium Non PNS	0.94%	0.06%	0.66%
Belanja Perjalanan Dinas	5.21%	4.72%	5.05%
Belanja Jasa Kantor	51.87%	6.64%	37.42%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.83%	2.91%	4.21%
Uang Lembur	2.04%	1.38%	1.83%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.24%	0.00%	0.16%
Jumlah			97.11%

ASB kegiatan Penyusunan Dokumen Peraturan, Perencanaan, Laporan, dan Prosedur menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.76. Daftar Kelas OPD ASB 35

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas lainnya, Seluruh Sekolah, dan Seluruh Kecamatan
2	
3	
4	
5	Dinas Kesehatan

4.1.35 ASB 36: Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi

Deskripsi:

Kegiatan dalam rangka mengelola/mengembangkan kegiatan yang tengah berjalan seperti pengelolaan website dan sistem, pengelolaan data dan informasi, dan atau kegiatan lain OPD dalam daerah.

Tabel 4.77. Hasil Uji Distribusi t ASB 36

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata-rata
Total Anggaran			
Kelas 1	241,551,300	7,036,400	
Kelas 2	476,066,200	241,551,300	
Kelas 3	710,581,100	476,066,200	
Honorarium PNS	12.10%	0.00%	8.52%
Honorarium Non PNS	0.82%	0.00%	0.44%
Belanja Bahan Pakai Habis	14.04%	10.17%	12.31%
Belanja Perjalanan dinas dalam negeri	24.56%	29.80%	25.41%
Belanja Jasa Kantor	44.11%	13.74%	35.22%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0.10%	0.00%	0.06%
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.60%	0.00%	1.88%
Uang Lembur	1.76%	0.00%	1.03%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.05%	0.00%	1.47%
Belanja Sosialisasi	0.98%	0.00%	0.47%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.71%	0.00%	5.27%
Jumlah			92,08%

ASB kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama. \checkmark

Tabel 4.78. Daftar Kelas OPD ASB 36

Kelas	Daftar OPD
1	DINAS Kominfo, BKPSDMD, Inspektorat, Bappelitbangda, Protokol, Badan keuangan Daerah, Bagian Organisasi, Dinas Pertanian, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan, Dinas Perikanan
2	Dinas Kesehatan, Bagian Adm. Pembangunan
3	Sekretariat Daerah

4.1.36 ASB 37: Kegiatan Penyerahan Bantuan Kepada Pihak Ketiga

Deskripsi:

Kegiatan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang oleh OPD kepada masyarakat atau pihak lainnya.

Tabel 4.79. Hasil Uji Distribusi t ASB 37

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata- rata
Total Anggaran			
Kelas 1	14,110,394,476.86	51,200,000.00	
Kelas 2	28,169,588,953.71	14,110,394,476.86	
Kelas 3	42,228,783,430.57	28,169,588,953.71	
Kelas 4	56,287,977,907.43	42,228,783,430.57	
Kelas 5	70,347,172,384.29	56,287,977,907.43	
Kelas 6	84,406,366,861.14	70,347,172,384.29	
Kelas 7	98,465,561,338.00	84,406,366,861.14	
Belanja Barang Pakai Habis	2.43%	0.00%	3.69%
Belanja Jasa Kantor	0.55%	0.00%	0.94%
Belanja Perjalanan Dinas	0.38%	0.00%	0.67%
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0.62%	0.00%	0.66%
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0.01%	0.00%	0.01%
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	4.48%	0.00%	4.17%
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0.47%	0.00%	0.44%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	94.47%	0.00%	87.95%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0.03%	0.00%	0.03%
Belanja Tidak Terduga	0.47%	0.00%	0.44%
Jumlah			99%

ASB kegiatan Penyerahan Bantuan kepada Pihak Ketiga menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini

dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.80. Daftar Kelas OPD ASB 37

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, UPTD Pembibitan dan Agribisni, Bagian Kesejahteraan Sosial
2	
3	
4	
5	BKD

4.1.37 ASB 38: Kegiatan Pelayanan

Deskripsi:

Kegiatan yang dilakukan oleh OPD untuk melayani administrasi atau pelayanan lainnya bagi ASN dan masyarakat.

Tabel 4.81. Hasil Uji Distribusi t ASB 38

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata-rata
Total Anggaran			
Kelas 1	1,229,459,854	800,000	
Kelas 2	2,458,119,708	1,229,459,854	
Kelas 3	3,686,779,562	2,458,119,708	
Kelas 4	4,915,439,416	3,686,779,562	
Kelas 5	6,144,099,270	4,915,439,416	
Kelas 6	7,372,759,124	6,144,099,270	
Kelas 7	8,601,418,978	7,372,759,124	
Kelas 8	9,830,078,832	8,601,418,978	
Kelas 9	11,058,738,686	9,830,078,832	
Kelas 10	12,287,398,540	11,058,738,686	
Honorarium PNS	0.12%	0.00%	0.07%
Honorarium Non PNS	1.09%	0.13%	0.78%
Belanja Bahan Pakai Habis	16.11%	16.97%	16.39%
Belanja Jasa Kantor	46.22%	34.31%	42.42%
Belanja Perjalanan dalam negeri	6.90%	9.66%	7.78%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0.39%	0.07%	0.29%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.46%	0.00%	0.30%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	0.74%	0.00%	0.39%
Belanja Bahan/Material	2.13%	1.14%	1.82%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.06%	0.00%	0.03%
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0.08%	0.00%	0.03%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0.05%	0.00%	0.02%
Belanja Sosialisasi	0.09%	0.00%	0.05%
Belanja yang bersumber dari Non Kapitasi Jaminan		1.05%	2.19%

Kesehatan Nasional	
Jumlah	72,56%

ASB kegiatan Pelayanan menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.82. Daftar Kelas OPD ASB 38

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas lainnya yang melakukan kegiatan pelayanan dan seluruh Puskesmas
2	
3	
4	
5	
5 6	
7	RSUD, Dinas Kesehatan

4.1.38 ASB 39: Kegiatan Pengawasan, Evaluasi, Pengendalian dan Pemantauan

Deskripsi:

Kegiatan untuk pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan yang dilakukan oleh OPD selain terhadap program kerja/kegiatan internal OPD.

Tabel 4.83. Hasil Uji Distribusi t ASB 39

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata-rata
Total Anggaran			
Kelas 1	217,805,392	800,000	
Kelas 2	434,810,785	217,805,392	
Kelas 3	651,816,177	434,810,785	
Kelas 4	868,821,570	651,816,177	
Kelas 5	1,085,826,962	868,821,570	
Belanja Barang Pakai Habis	18.46%	12.14%	15.98%
Belanja Perjalanan Dinas	8.00%	0.49%	5.06%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.69%	43.17%	50.18%
Belanja Jasa Kantor	18.55%	10.89%	15.55%
Honorarium PNS	6.88%	1.32%	4.70%
Honorarium Non PNS	3.23%	0.00%	1.45%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.58%	0.00%	0.36%
Belanja Bahan/Material	1.71%	0.00%	0.93%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.97%	0.91%	2.77%
Uang Lembur	0.29%	0.00%	0.15%
Belanja Uang yang Diberikan kepada	0.27%	0.00%	0.13%

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		0.00%	0.26%
Belanja Aset Sewa lainnya	0.15%	0.00%	0.06%
Jumlah			97,58%

ASB kegiatan Pengawasan, Evaluasi, Pengendalian dan Pemantauan menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.84. Daftar Kelas OPD ASB 39

Kelas	Daftar OPD
1	BKD, Kominfo, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan, Dinas P2KB, Dinas Kesehatan, RSUD, Seluruh Bagian, Puskesmas Pahar, Puskesmas Weeluri, Protokol, Seluruh Kecamatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, BKPSDM, DPMD, Dinas Transmigrasi
2	Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian
3	SATPOLPP, Inspektorat
4	Sekretariat DPRD, Dinas Peternakan
5	Bapelitbangda

4.1.39 ASB 40: Kegiatan Penyelenggaraan Promosi

Deskripsi:

Kegiatan penyebarluasan informasi penyuluhan, promosi produk, dan kesehatan.

Tabel 4.85. Hasil Uji Distribusi t ASB 40

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata-rata
Total Anggaran	268,465,575	1,090,000	
Belanja Barang Pakai Habis	43.66%	28.70%	38.12%
Belanja Jasa Kantor	3.50%	1.44%	2.76%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.83%	48.43%	54.10%
Belanja Honorarium	1.20%	0.00%	0.54%
Belanja sewa peralatan dan mesin	0.48%	0.00%	0.21%
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.16%	0.00%	0.50%
Jumlah			96,23%

ASB kegiatan Penyelenggaraan Promosi menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan 🛶

dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

4.1.40 ASB 41: Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Deskripsi:

Jasa/honorarium bagi pelayanan umum kantor dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan

Cost Driver: Jumlah Orang

Tabel 4.86. Hasil Uji Normalitas ASB 41

					Unstandardize d Residual
N					37
Normal Parametersa,h		Mean			.0000000
		Std. Devia	tion		16167343.222 95155
Most Extre	me	Absolute			.311
Differences		Positive			.217
		Negative			311
Test Statistic					.311
Asymp. Sig. (2-tailed)					<.001
Monte Carlo Sig.		Sig.			<.001
tailed)d	7	99%	Confidence	Lower	.000
area concentration of the conc		Interval		Bound	
				Upper Bound	.000

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas, karena nilai signifikannya (0,000) dibawah 0,05 (5%). Artinya adalah data menunjukkan ketidaknormalan data antara satu dengan yang lainnya. Penyebab ketidaknormalan data adalah nilai outliers. Outliers merupakan nilai ekstrim yang menyimpang dari pola distribusi data lainnya. Melanggar asumsi normalitas berarti ASB tidak dapat dipakai karena hasilnya tidak menjadi BLUE (Best Linier Unbias Estimator). Jika ASB dipakai, maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggaran.

Data outliers dapat diatasi dengan cara menghilangkan data yang menyimpang dari distribusi. Namun sulit untuk dilakukan karena jumlah data sangat minim serta penghilangan data outliers tidak dapat dilakukan karena berpengaruh pada anggaran dan merugikan OPD sebab menghapus data outliers dapat menyebabkan hilangnya informasi dan hasil yang bias. Berikutnya, jika dari total data yang diolah ada OPD yang tidak mengumpulkan data akan dirugikan karena harus mengikuti OPD lainnya.

Tabel 4.87. Hasil Uji F ASB 41

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14909128333 9392448.000	1	14909128333 9392448.000	554.550	<.001b
	Residual	94097875279 93824.000	35	26885107222 8394.970		

Total	15850107086	36
	7386272.000	

a. Dependent Variable: Total Anggaran

b. Predictors: (Constant), Jumlah Orang

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan layak, dikarena nilai signifikan 0,001 dibawah nilai 0,05 namun tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi asumsi normalitas. Implikasinya adalah ASB Kegiatan: Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak dapat dilanjutkan. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya.

Penyebabnya adalah:

- a) Data yang digunakan mungkin tidak akurat, tidak lengkap.
- b) Ukuran sampel terlalu kecil.
- c) Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, hasil model bisa menjadi tidak layak.
- d) Keberadaan outlier dapat menyebabkan hasil model menjadi bias, sehingga uji F menunjukkan model tidak signifikan.

Tabel 4.88. Hasil Uji t ASB 41

				Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4069588.279	4378012.43 0		.930	.359
	JumlahOran g	22944985.70 7	974355.748	.970	23.549	<.001

a. Dependent Variable: Total Anggaran

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa Jumlah orang berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dikarenakan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05). Akan tetapi, ASB Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak dapat dianalis dengan model regresi linear berganda karena data tidak normal. Jika ASB dipakai maka akan berdampak kurang baik bagi Pemerintahan (dalam hal ini OPD) dalam menentukan besaran anggarannya.

Persamaan Y:

Y = a + bX

a = 4.069.588,279

 $b_1 = 22.944.985,707$

Sehingga:

Y = 4.069.588,279 + 22.944.985,707X

Keterangan:

Y = Total Anggaran

a = Biaya Tetap

b = Biaya Variabel Jumlah orang

X = Jumlah Orang 🛶

Simulasi:

Salah satu OPD melakukan kegiatan jasa pelayanan umum kantor yang dikerjakan oleh 1 orang, maka total anggaran yang dibutuhkan adalah:

Y = 4.069.588,279 + 22.944.985,707X Y = 4.069.588,279 + 22.944.985,707(1) Y = 4.069.588,279 + 22.944.985,707Y = 27.014.573,986

Jadi, total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 27.014.573,986

Dari kondisi di atas maka metode titik tertinggi dan titik terendah digunakan dalam menghasilkan ASB Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor:

Tabel 4.89. Hasil Uji Distribusi t ASB 41

Keterangan	Batas Maksimum	Batas Minimum	Rata- rata
Total Anggaran			
Kelas 1	173,840,903.33	1,052,500.00	
Kelas 2	346,629,306.67	173,840,903.33	
Kelas 3	519,417,710.00	346,629,306.67	
Belanja Barang Habis pakai	6.81%	6.31%	6.61%
Belanja Jasa Kantor	86.55%	80.98%	84.32%
Jumlah			90.93%

ASB kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor menggunakan distribusi t dengan kategori. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana kategori membuat ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran antar OPD. ASB kegiatan ini dapat diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait, agar tidak menyebabkan perbedaan antara OPD dalam satu kegiatan yang sama.

Tabel 4.90. Daftar Kelas OPD ASB 41

Kelas	Daftar OPD
1	Dinas lainnya
2	Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM
3	Dinas PPO, Dinas Pendidikan,

BUPATI SUMBA TENGAH,

USUP LERY RUPIDARA